



**2023**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125  
Telp : (0541) 7807960,  Konsultasi Pengaduan : 085173066557, Konsultasi Perizinan : 085173466558, Konsultasi LKPM : 085173266556  
Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>, Pos-el: [dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id), [perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id)  
Media Sosial:  Dpmptsp Kalimantan Timur  @dpmptsp\_kaltim  dpmptsp.kaltim  DPMPTSP KALTIM

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.7.5/1894.V/DPMPTSP-SEKR

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DI LINGKUNGAN DPMPTSP PROV. KALTIM TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kaltim tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023 pada kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :     /     /  
DPMPTSP-SEKR     TENTANG     PEMBENTUKAN     TIM  
PENYUSUNAN, MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) DI LINGKUNGAN  
DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

I. TIM PENGARAH

Ketua           : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur  
Anggota        : 1. Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM  
                  2. Kabid Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
                  3. Kabid Promosi Penanaman Modal  
                  4. Kabid Pengendalian Pelaksanaan  
                  5. Kabid Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan

II. TIM PELAKSANA

Ketua           : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur  
Anggota        : 1. Seluruh Pejabat Fungsional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur  
                  2. Kasubbag Umum DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

III. TIM SEKRETARIAT

Ketua           : Analis Perencanaan Anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur  
Anggota        : 1. Roni Helpani, S.P  
                  2. Belin Ruruk, S.Kom  
                  3. Ence Deasy Yuniasari, S.S  
                  4. Anita Tyas Fachliza, SE  
                  5. Muhammad Arif Husain Saudek, S.Kom  
                  6. Decky Diyan Kesuma, S.Psi

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal, 27 Desember 2023

K e p a l a,



**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Kerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023 kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Tim Monitoring Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2023, dalam melaksanakan tugasnya, Tim harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2024 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal, 27 Desember 2023

K e p a l a,

  
**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagai aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan perizinan, promosi dan investasi pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan LKjIP ini. Semoga LKjIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam kemudahan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan menumbuhkan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Februari 2024

Kepala,



ENGUH ANJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 39.149.883.327,00 dan realisasi belanja Rp. 34.107.992.704,00 dengan persentase (87,12%). Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis yaitu 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara dengan Pagu Anggaran Rp. 3.572.052.600,00 dengan realisasi Rp. 2.422.036.402,00 (67,74%), 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik dengan Pagu Anggaran Rp. 3.724.370.000,00 dengan realisasi Rp 3.493.553.628,00 (93,80%).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	01
B. Tugas dan Fungsi .....	04
C. Struktur Organisasi .....	05
D. Sumber Daya Manusia .....	06
E. Aspek Strategis Organisasi .....	07
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	07
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	23
C. Perjanjian Kinerja .....	24
1. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	24
2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2023 .....	25
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP .....	30
1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja .....	30
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat .....	30
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	34
1. Realisasi Investasi PMDN .....	34
C. Analisis Capaian Kinerja .....	35
1. Membandingkan Antara Target Realisasi Kinerja .....	35
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	36
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD dan Renstra .....	38
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional .....	38
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	40
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan .....	43
D. Realisasi Anggaran .....	46
1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....	46
2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kaltim06	
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim .....	11
Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis .....	17
Tabel 2.2 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran .....	18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2023.....	24
Tabel 2.5 Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2023 .....	25
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis.....	28
Tabel 3.1 Tabel Nilai Hasil AKIP .....	30
Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi .....	31
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	34
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	35
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun.....	36
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA .....	38
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja berdasarkan target Nasional .....	38
Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja .....	46
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	47
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal .....	51
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal .....	53
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan PM .....	55
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal.....	57
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim .....	05
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN .....	37
Gambar 3.2 Capaian Realisasi Investasi RI Tahun 2023 .....	38
Gambar 3.3 Peringkat Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2023 .....	39
Gambar 3.4 Peringkat Nasional Realisasi Investasi Provinsi Kaltim.....	40

## **LAMPIRAN**

- Lampiran I Press Release Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- Lampiran II Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
- Lampiran III Pohon Kinerja DPMPTSP Provinsi Kaltim Tahun 2023
- Lampiran IV Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Perbaikan/  
Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja RENSTRA  
2019 – 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur



maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi dilaunching pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”***, dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

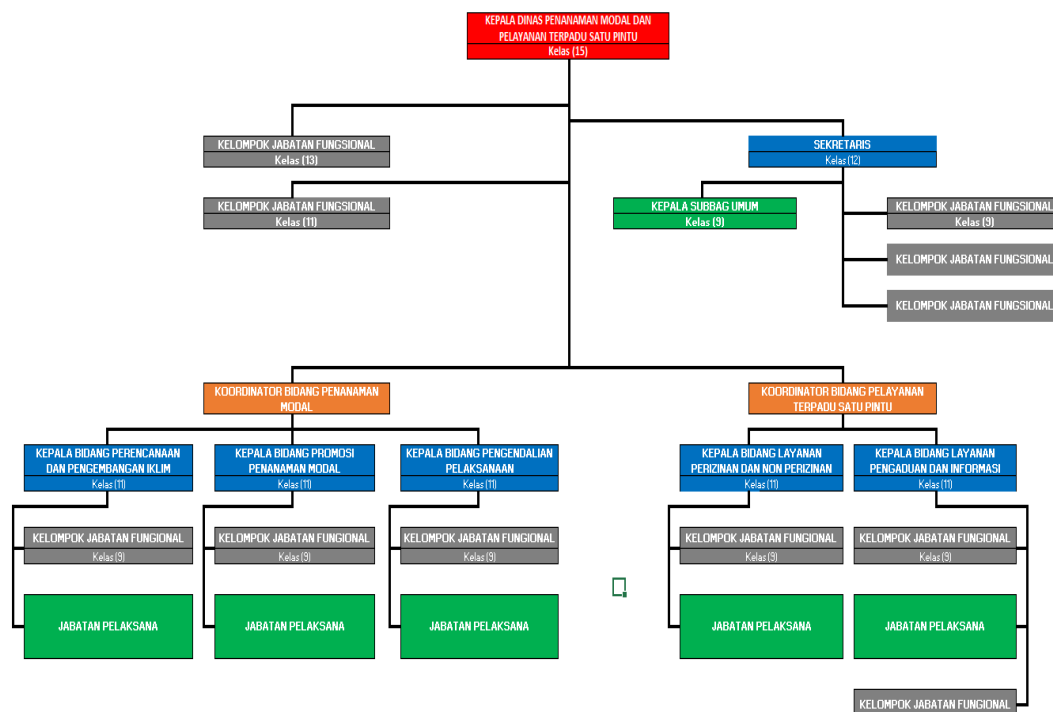
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

### C. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, namun **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur belum mengikuti Nomenklatur Permenpan 90 Tahun 2019** sehingga pada saat ini masih memakai struktur organisasi yang ada, seperti pada Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan (Yandu) yang seharusnya pada Nomenklatur Permenpan 90 Tahun 2019 seharusnya tidak ada lagi masuk dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur. Berikut bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang ada :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim



#### D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Desember 2023 sebanyak 34 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II.A Kepala Dinas, 6 orang Pejabat Struktural Eselon III.A, 12 orang Pejabat Struktural Eselon IV.A dan 15 orang staf DPMPTSP Prov. Kaltim.

**Tabel 1.1** Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				
		Pria	Wanita	I V	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLT A	SLT P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1				
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	3	3	6				6				
3	Kasubbag & Pejabat Fungsional	5	7	2	10			3	9			
4	Pelaksana	9	6		11	3	1		9	3	3	
Jumlah PNS		18	16	9	21	3	1	10	16	3	3	
Jumlah Non PNS		34	25					5	38	2	12	2
Jumlah PNS + Non PNS		53	41	9	21	3	1	10	16	3	3	2

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS 2023

#### E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Program dan Kegiatan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penguatan dan penajaman kegiatan yang langsung menyentuh pengembangan dan penggalan potensi investasi daerah, selektifitas sasaran promosi potensi, peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap eksistensi Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta terkait dalam Visi dan Misi Gubernur segala yang terkait investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah Public Service.

#### **F. Permasalahan Utama Isu Strategis**

Isu-isu permasalahan terdiri dari 2 bagian, yaitu identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal memiliki 2 komponen, yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sementara kondisi eksternal yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treat*).

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas menarik investasi, maka komponen-komponen SWOT tersebut adalah :

1. Kekuatan (*Strength*)
  - a. Komitmen Pimpinan.
  - b. Adanya kelembagaan dan struktur organisasi..

- c. Adanya pengawasan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi (Monev)
  - d. Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai.
  - e. Sumber Daya Manusia yang kompeten
  - f. Diterapkannya OSS (*Online Single Submission*)
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Masih ada ketidaksinkronan antara RTRW Kaltim dengan RTRW Kabupaten/Kota.
  - b. Ketidakpastian peruntukan lahan.
  - c. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanaman modal belum optimal.
  - d. Infrastruktur dan utilitas terbatas.
3. Peluang (*Opportunity*)
- a. Perundangan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
  - b. Keamanan daerah yang kondusif.
  - c. Tersedianya kawasan industri.
  - d. Tersedianya sumber daya alam.
  - e. Iklim Usaha yang kondusif.
  - f. Kerjasama Regional dan Internasional.
  - g. Besarnya Investasi Pemerintah Daerah.
  - h. Banyaknya Investor yang berminat berinvestasi di Kaltim.
  - i. Upaya penyelarasan RT/RW Kalimantan Timur dengan Kabupaten/Kota.
  - j. Pasar domestik dan pasar ekspor.
4. Ancaman (*Treat*)
- a. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.
  - b. Kemudahan penanaman modal di negara lain.
  - c. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta tuntutan non normatif.
  - d. Pasar bebas tenaga kerja (AFTA) dan perdagangan global.
  - e. Capital Flight; Hambatan non tariff dalam system perdagangan global.
  - f. Issue dampak kerusakan lingkungan.
- Dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi di Kalimantan

Timur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah, maka harmonisasi amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur **pada arah kebijakan Strategis DPMPTSP Tahun 2019 – 2023 dengan 4 arah kebijakan, yaitu :**

1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara;
2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik;
3. Pemantauan komitmen perizinan;
4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

Hal tersebut telah diterjemahkan kedalam penguatan dan penajaman kegiatan yang lebih fokus, terarah dan konsisten yang tentunya harus ditopang dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menuju pada tahapan birokrasi yang semakin profesional dalam rangka pemberian pelayanan prima (service excellent) sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat dunia usaha, selektifitas terhadap promosi yang akan dilaksanakan, pengembangan potensi investasi yang profitable dan diminati pasar global, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan yang sudah eksis, sehingga operasionalisasi dapat berjalan dengan baik serta penataan dan pembenahan kearah Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mendapatkan legitimasi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan demikian operasionalisasi PTSP dalam menarik investor telah dimulai dengan terealisasinya Pembentukan Tim Teknis. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. **Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur :**

1. Masalah pokok di bidang penanaman modal adalah belum

optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier. ;

2. Kawasan strategis ekonomi provinsi Kalimantan Timur masih belum memberikan kontribusi yang signifikan ;
3. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis ;
4. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini ;
5. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap Bisnisnya ;
6. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur ;
7. Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah tertentu ;
8. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal;
9. Tumpang tindih lahan antara :
  - a. Perusahaan tambang batubara
  - b. Perusahaan tambang batubara *versus* perusahaan perkebunan
  - c. Perusahaan perkebunan *versus* perusahaan perkebunan
  - d. Perusahaan tambang batubara atau galian C dan perusahaan perkebunan *versus* peruntukan/kepentingan lainnya.
10. Kewenangan perijinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi masih ada yang belum *clean and clear* ;



11. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi ;
12. Kewenangan perijinan yang masih belum jelas pembagiannya ;
13. Masih ada pelayanan perijinan selain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
14. Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor
15. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

#### **G. Sarana dan Prasarana Kerja**

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 M2 di jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur melalui pengadaan sampai dengan tahun 2021, secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim berikut ini :

**Tabel 1.2** Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BANYAKNY A</b>	<b>SATUAN</b>
1	Tanah	2.895	M2
2	Ruang Rapat	3	Ruang
3	Ruang Kerja Pejabat Struktural	8	Ruang
4	Ruang Arsip	2	Ruang
5	Ruang Audio Visual	1	Ruang
6	Ruang Mushola	1	Ruang

7	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
8	Ruang Gudang Barang	2	Ruang
9	Kantin	1	Ruang
10	Taman	1	Ruang
11	Kendaraan Roda 2/Motor	20	Unit
12	Kendaraan Roda 4/Mobil	13	Unit
13	Meja Rapat	26	Unit
14	Kursi Rapat	138	Unit
15	Lemari	105	Unit
16	Filling Kabinet	32	Unit
17	CCTV	16	Set
18	Mesin Fotocopy	4	Unit
19	Air Conditioner	68	Unit
20	Televisi	14	Unit
21	Faximili	1	Unit
22	Laptop	38	Unit
23	Printer	85	Unit
24	UPS	25	Unit
25	Scanner	19	Unit
26	Mesin Tik	17	Unit
27	Microphone Wireless	6	Unit
28	Speaker	4	Unit
29	Subwofer	2	Unit
30	Keyboard	3	Unit
31	Equalizer	1	Unit
32	Hard Disk	15	Unit
33	Recorder	1	Unit
34	LCD Projector/Infocus	8	Unit
35	Mesin Absensi	1	Unit
36	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
37	Hardisk Eksternal	10	Unit
40	Sound System	4	Unit
41	Monitor	8	Unit
42	Komputer	86	Unit
43	Kamera	10	Unit
44	Telepon	10	Unit
45	CPU	17	Unit
46	Microphone	40	Unit

47	Sofa & Meja Tamu	10	Unit
48	Mesin Pengancur Kertas	5	Unit
49	Videowall	1	Unit

*Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal*

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Provinsi Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja, maka visi dan misi didalam dokumen RPJMD diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi DPMPSTSP Provinsi Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target investasi.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPSTSP Provinsi Kaltim juga dilakukan perubahan dan ditetapkan melalui Pergub Kaltim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”**, Sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2023 dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kaltim dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025, sesuai dengan salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam salah satu Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Berdasarkan tujuan tersebut diatas untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah yang tertuang di dalam dokumen P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (halaman 353), yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara”**.

Selain Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara, DPMPTSP memiliki Sasaran Strategis ke 2 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik”** yang sayangnya tidak tertuang dalam Dokumen

Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga hanya berupa kesepakatan antara Kepala Dinas dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas serta Dokumen Indikator Kinerja Utama.

Dalam dokumen P-RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 halaman 67 dinyatakan bahwa terdapat 6 sasaran yang mana hal ini menjadi tidak selaras dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya (IKU, RKT, Perjanjian Kinerja).

Untuk mengakomodir kedua hal tersebut, telah dilakukan upaya perbaikan/penyempurnaan Dokumen RENSTRA melalui rapat pembahasan **Perbaikan/Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA 2019 – 2023) dan penetapan Berita Acara yang diketahui oleh pimpinan organisasi.** (tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 poin a.2)

Berdasarkan Berita Acara Review tersebut, adapun perumusan tujuan, sasaran beserta program kegiatan singkat tersaji dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RENSTRA DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Mewujud-kan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berke lanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara	Meningkat-nya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	25,53	22,31	25,14	32,53	35,00	35,67
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87.30	87,91	87,6	85	85	86

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

(Target Nilai Investasi pada Bab V hal 294) dan Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada dokumen Perjanjian Kinerja Kadis Per tahun dan dokumen Indikator Kinerja Utama.



**Tabel 2.2** Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkat-nya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
					Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal

							Kewenangan Provinsi
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</li> </ul>

							Pelaksanaan Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal - Penyediaan Layanan

							<p>Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</p>
					<p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman</p>	<p>- Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan</p>

						Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Casecading Tahun 2023

Adapun **hubungan antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) yang selaras dengan renstra dapat dilihat dalam Pohon Kinerja DPMPSTSP Provinsi Kaltim Tahun 2023.** (\*tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023 poin a.1)

## B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 yang merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, dapat di lihat di tabel 2.3:

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Untuk mengukur perkembangan nilai investasi dan meningkatkan minat investasi	$\frac{\text{realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi (32,53 Triliun)}} \times 100\%$	Press Release BKPM	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	$\frac{\text{realisasi Capaian IKM}}{\text{Target IKM (86 Indeks)}} \times 100\%$	Survey	Kepala DPMP TSP Provinsi Kaltim

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Kepala DPMPTSP Tahun 2023

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi, berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun Rp	35,67
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86

*Sumber : Dokumen Rancangan Akhir P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023*

#### 1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan, di tetapkan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 38.647.183.327,00,- dan pada anggaran perubahan (APBD-P) mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 502.700.000,00, sehingga total anggaran untuk tahun 2023 adalah



senilai Rp 39.149.883.327,00. Penambahan anggaran tersebut berupa belanja Dana FCPF senilai Rp 320.000.000,00 dan kenaikan gaji Non ASN senilai Rp 182.700.000,00.

## 2. Target Belanja DPMPTSP Provinsi Kaltim Tahun 2023

Dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 39.149.883.327,00 adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 34.107.992.704,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.041.890.623,00 (12.88%).

**Tabel 2.5** Target Belanja DPMPTSP Provinsi Kaltim 2023

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.122.796.887</b>	<b>20.991.030.813</b>	<b>87.01</b>	<b>99.57</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>768.111.800</b>	<b>613.304.003</b>	<b>79.84</b>	<b>86.73</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	368.057.800	341.511.746	92.78	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.054.000	271.792.257	67.93	74.52
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.581.556.910</b>	<b>11.436.997.687</b>	<b>84.20</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.604.139.550	7.680.927.315	79.97	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	3.765.497.360	3.316.952.800	94.55	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211.920.000	195.608.800	92.30	100
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.840.000</b>	<b>15.840.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	15.840.000	15.840.000	100	100
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>432.965.500</b>	<b>384.938.000</b>	<b>88.90</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	349.948.600	314.318.000	89.81	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.016.900	70.620.000	85.06	100
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.137.709.077</b>	<b>3.753.833.475</b>	<b>90.72</b>	<b>100</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.910.700	24.712.000	95.37	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.651.600	15.534.250	99.82	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	308.845.000	302.156.800	97.83	99.99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000	17.964.000	92.63	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.368.000.000	1.125.866.425	82.30	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.399.999.777	2.267.600.000	94.48	100
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.994.826.600</b>	<b>2.922.132.600</b>	<b>97.57</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	226.604.260	224.995.000	99.28	99.99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.768.222.340	2.697.137.600	97.43	99.99
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.210.756.200</b>	<b>1.026.358.734</b>	<b>84.77</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.874.200	354.964.734	80.15	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.700.000	249.330.000	98.66	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.182.000	422.064.000	81.92	100
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>981.030.800</b>	<b>837.626.314</b>	<b>85.38</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	346.342.000	295.716.454	85.38	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.060.000	202.919.500	72.19	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.072.400	48.754.000	86.62	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.556.400	290.416.360	97.60	100
<b>II.</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.923.159.767</b>	<b>97.43</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.923.159.767</b>	<b>97.43</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	700.000.000	685.988.048	97.99	100
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi				100

		2.300.000.000	2.237.171.719	97.26	
<b>III.</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3.752.484.840</b>	<b>3.182.950.772</b>	<b>89.09</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>3.752.484.840</b>	<b>3.182.950.772</b>	<b>89.09</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.546.533.640	1.424.376.046	92.10	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2.025.951.200	1.758.574.726	86.80	<b>100</b>
<b>IV.</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>3.724.370.000</b>	<b>3.493.553.516</b>	<b>93.80</b>	<b>99.46</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>3.724.370.000</b>	<b>3.493.553.516</b>	<b>93.80</b>	<b>99.46</b>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.214.370.000	1.087.641.449	89.56	100
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.000.000.000	971.027.121	97.10	97.00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	690.000.000	682.570.269	98.92	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	820.000.000	752.314.677	91.74	100
<b>V.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>3.575.025.600</b>	<b>2.422.036.402</b>	<b>67.74</b>	<b>84.34</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>3.575.025.600</b>	<b>2.422.036.402</b>	<b>67.74</b>	<b>84.34</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.449.425.600	1.346.683.831	92.91	100

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	861.650.000	490.026.153	56.87	70.34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.263.950.000	585.326.418	46.30	75.93
VI.	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>1.155.206.000</b>	<b>1.0095.261.434</b>	<b>94.81</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.155.206.000</b>	<b>1.0095.261.434</b>	<b>94.81</b>	<b>100</b>
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.155.206.000	1.095.261.434	100	100
	<b>Total</b>	<b>39.149.883.327</b>	<b>34.107.992.704</b>	<b>87.12</b>	<b>98.86</b>

Sumber : Data TEPPA Periode 31 Desember 2023

### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6** Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian	Program
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Rp. 10.147.510.440,00	Rp. 8.528.146.941,00	84,04%	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi

					Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Rp 4.879.576.000,00	Rp 4.588.814.950,00	94,04%	- Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sumber : Data TEPPRA Periode 31 Desember 2023

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA**

**1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sesuai laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700.1.2.1/2104/ITPROV-IV/2023 tanggal 12 Juni 2023, memperoleh nilai sebesar **65,20** (Enam puluh Lima koma Dua Puluh) atau dengan predikat penilaian **“B”(Baik)**, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Tabel Nilai Hasil AKIP

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2021	Nilai 2022	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	24,47	20,70	- 3,770
2	Pengukuran Kinerja	20	12,19	13,80	+ 1,61
3	Pelaporan Kinerja	10	7,83	6,30	-1,53
4	Evaluasi Internal	20	4,05	9,20	+ 5,15
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	12,08	15,20	+ 3,12
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>62,18</b>	<b>65,20</b>	<b>+ 3,02</b>
	<b>Kategori Penilaian</b>		<b>Baik “B”</b>	<b>Baik “B”</b>	

*Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2023*

**2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.**

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 terhadap beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

**Tabel 3.2** Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Belum/Sudah
<b>I Perencanaan Kinerja</b>			
1.	Perencanaan kinerja hendaknya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting); -	Menyusun Pohon Kinerja Tahun 2023 untuk menampilkan hubungan antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) yang selaras dengan renstra	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung :  Pohon Kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (Lampiran 3 Dokumen LKjIP)
2	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil revidi dokumen perencanaan serta diketahui oleh pimpinan organisasi.	Melakukan review dokumen perencanaan guna menyelaraskan sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Kaltim yang dituangkan dalam berita acara serta diketahui oleh pimpinan organisasi	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung :  Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Perbaikan / Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja RENSTRA 2019 – 2023 (Lampiran 4 Dokumen LKjIP)
<b>II Pengukuran Kinerja</b>			
3	Data kinerja yang dikumpulkan sepenuhnya relevan dan mendukung dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Memastikan Data kinerja yang dikumpulkan sepenuhnya relevan dan mendukung dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : Tabel 3.3 Dokumen LKjIP
4	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi/langkah-langkah, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi/langkah-langkah, penyesuaian kebijakan, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : Penetapan pejabat fungsional berdasarkan refocusing organisasi



5	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan mencantumkan perbandingan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada 2 tahun anggaran sebelumnya	Menyusun penjelasan atas realisasi capaian kinerja dan anggaran 2023 serta perbandingan dengan 2 tahun anggaran sebelumnya	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : Dokumen LKjIP BAB 3 Sub BAB D
<b>III Pelaporan Kinerja</b>			
6	Menginfokan perbandingan realisasi tahun berkenaan dengan target Renstra pada tahun berkenaan dan target akhir Renstra pada dokumen LKjIP;	LKjIP menginformasikan hanya 2 sasaran renstra karena telah dilakukan review dokumen perencanaan guna menelaraskan sasaran strategis DPMPSTSP Provinsi Kaltim untuk penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023 mendatang	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : Tabel 3.5 Dokumen LKjIP
7	Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran di setiap triwulan dan dipantau langsung oleh Kepala Dinas menjadi acuan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta memberikan perubahan budaya kinerja organisasi menjadi lebih baik	<b>Sudah</b>  Dokumen Pendukung : Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja
8	Informasi dalam LKjIP digunakan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta memberikan perubahan budaya kinerja organisasi menjadi lebih baik	Kepala Dinas menjadi acuan untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	
<b>IV. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
9	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dan memberikan rekomendasi perbaikan dan menunjukkan perbaikan setiap periode;	Penyusunan SOP Evaluasi AKIP Internal DPMPSTSP Provinsi Kaltim sebagai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal/ capaian sasaran/ program/kegiatan	<b>Sudah</b>  Dokumen Pendukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1MYhpJM5P4KBxLsmPmEy4WduAna9qAl8U/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1MYhpJM5P4KBxLsmPmEy4WduAna9qAl8U/view?usp=drivesdk</a>

10	Memanfaatkan Teknologi informasi internal (Aplikasi) dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memanfaatkan aplikasi e SAKIP dalam melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/16kn1rQO8XXXOSvAAQkuY_LDQ7kLqw1SR?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/16kn1rQO8XXXOSvAAQkuY_LDQ7kLqw1SR?usp=drive_link</a>
11	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal dan mengimplementasikannya	Telah disampaikan Nota Dinas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang di DPMPTSP untuk melakukan rapat evaluasi internal tiap bulannya, yg kemudian akan menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Triwulan	<b>Sudah</b>  Dokumen Pendukung : <a href="https://drive.google.com/file/d/1ELLIDGXG9I4YtG9rgTXIDJY7WgeiuWae/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1ELLIDGXG9I4YtG9rgTXIDJY7WgeiuWae/view?usp=drive_link</a>
12	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi lebih efektif dan efisien		
<b>V. Capaian Akuntabilitas Kinerja</b>			
13	Mengupayakan peningkatan capaian kinerja tahun berjalan agar dapat melebihi capaian tahun sebelumnya	Menyusun Dokumen LKjIP yang memuat Tindak Lanjut Rencana Aksi Rekomendasi dari Hasil Evaluasi SAKIP sebagai upaya peningkatan capaian kinerja dan predikat nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	<b>Sudah</b>  Dokumen pendukung : Dokumen LKjIP DPMPTSP Provinsi Kaltim Tahun 2023
14	Memberikan informasi atas capaian Akuntabilitas Kinerja secara akurat dan andal disertai data dukung yang memadai		

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

**Tabel 3.3** Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Rp (Triwulan)	35,67	I	-	7,25	20,32
					II	-	10,032	28,12
					III	-	32,310	90,58
					IV	35,67	49,59	139,02
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86	I	-	85,23	99,10
					II	-	87,62	101,88
					III	-	88,53	102,94
					IV	86	89,37	103,91

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV 2023 dan hasil survey IKM 2023

Berdasarkan Tabel 3.3. diatas, target dan realisasi untuk masing – masing indikator kinerja Sasaran Strategis ditampilkan pada akhir periode/triwulan IV karena capaian indikator sasaran strategis tersebut merupakan capaian outcome yang baru dapat diukur dan bergantung pada kinerja organisasi pada akhir periode/triwulan IV. Data kinerja tersebut sepenuhnya relevan karena diperoleh berdasarkan sistem rekapitulasi.

## C. Analisis Capaian Kinerja

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2023 merupakan tahun akhir dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja (IKU) yang tertuang pada dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur memiliki dua sasaran yaitu **“1. Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batu Bara dan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik”**. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

**Tabel 3.4** Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Triliun Rupiah	35,67	49,59	139,02
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	89,37	103,91

Sumber :1. Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023, 2. hasil survey kepuasan masyarakat Periode Januari s/d Desember 2022

Berdasarkan hasil Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI pada hari Selasa, 24 Januari 2023 realisasi investasi pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 71.895.812.580.000,- (71,89 triliun rupiah) untuk keseluruhan sektor. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi RI untuk Provinsi

Kalimantan Timur sebesar Rp 64.500.000.000.000,- (64,5 triliun rupiah), sehingga Provinsi Kalimantan Timur telah **melampaui target dengan capaian sebesar 111,46%** dari target realisasi investasi pada tahun 2023.

Realisasi investasi tersebut masih mencakup capaian realisasi investasi sektor pertambangan sebesar Rp 22.300.615.780.000,- (22,3 triliun rupiah), maka realisasi investasi Non Migas dan Non Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 49.595.196.800.000,- (49,59 triliun rupiah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari indikator Nilai Investasi memiliki target Rp. 35,67 Triliun dengan realisasi Rp. 49,59 Triliun sehingga **capaian telah melampaui target sebesar 139,02%**. Informasi menyeluruh terkait realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat di Press Release Lampiran I dalam dokumen ini.

Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target 86 dengan realisasi 89,37 sehingga **capaian juga telah melampaui target sebesar 103,91%**. Rekapitulasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat di Lampiran II dalam dokumen ini.

## 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.5** Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya (n dan n-1)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan 9= (8-7/7*100%)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Peningkatan realisasi investasi	Rp (Triliun )	22,31	25.14	31,64	35,35	49,59	40,28
2	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Skor	86,79	86,70	89,69	89,41	89,37	-0,04

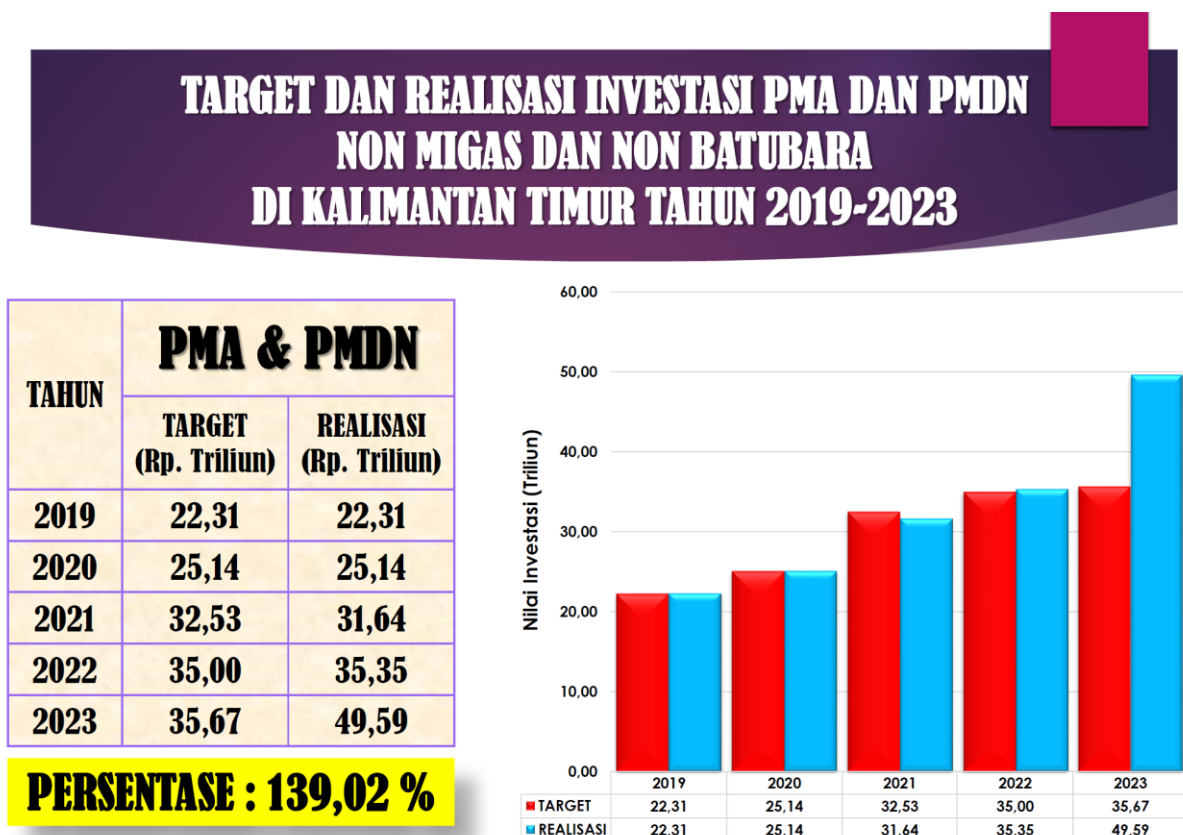
Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel 3.5 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi mencapai Rp. 35,35 Triliun dan mengalami peningkatan

pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 49,59 Triliun atau sekitar 40,28%.

Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 realisasi mencapai 89,41 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 89,37 (-0,04%). Namun demikian, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target dan termasuk dalam kategori sangat baik. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini

**Gambar 3.1** Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023



Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD/Renstra

**Tabel 3.6** Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA

No.	Indikator Kinerja (satuan)	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	35,67	49,59	139,02%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	89,37	103,91%

Sumber :Dokumen RPJMD Prov Kaltim, Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode Januari s/d Desember 2023

Dari tabel 3.6, dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar Rp. 35,67 Triliun dengan realisasi Rp. 49,59 Triliun yang berarti melampaui target sebesar 139,02% dari target yang ada. Untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 86 dengan realisasi 89,37 atau 103,91%. Hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target dan langkah –langkah dalam pencapaian target ditahun berikutnya pada Renstra.

### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

**Tabel 3.7** Realisasi Kinerja berdasarkan Standar Nasional

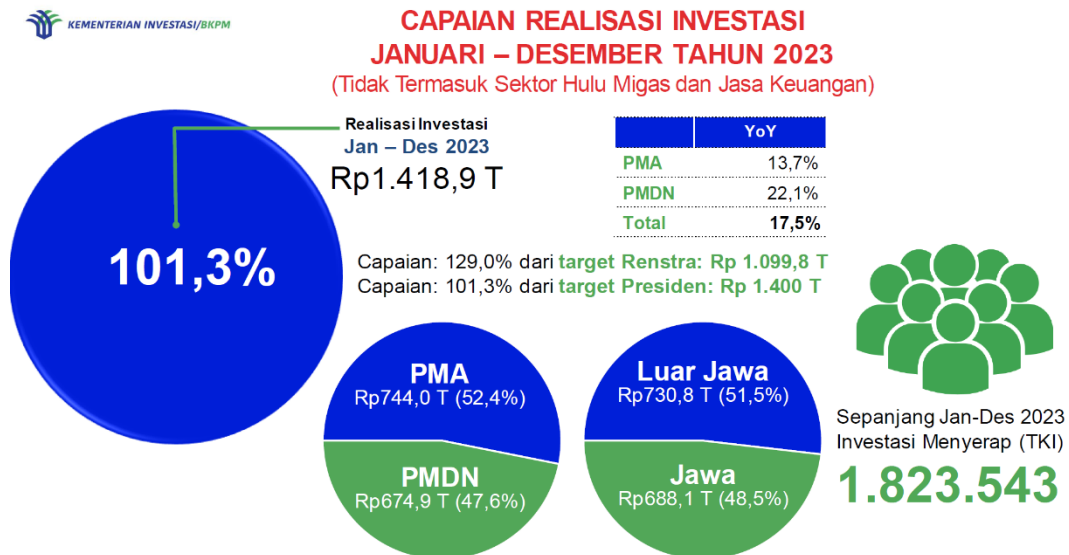
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Investasi	Rp (Triliun)	71,89	1.418,90	111.47%

Sumber :Dokumen RPJMD Prov Kaltim, Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan hasil Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI pada hari Selasa, 25 Januari 2024 realisasi investasi Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 1.418,9 Triliun Rupiah. Capaian ini melampaui target Renstra BKPM RI sebesar 129,0% dan target Presiden sebesar 101,3% dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 1.823.543 orang.



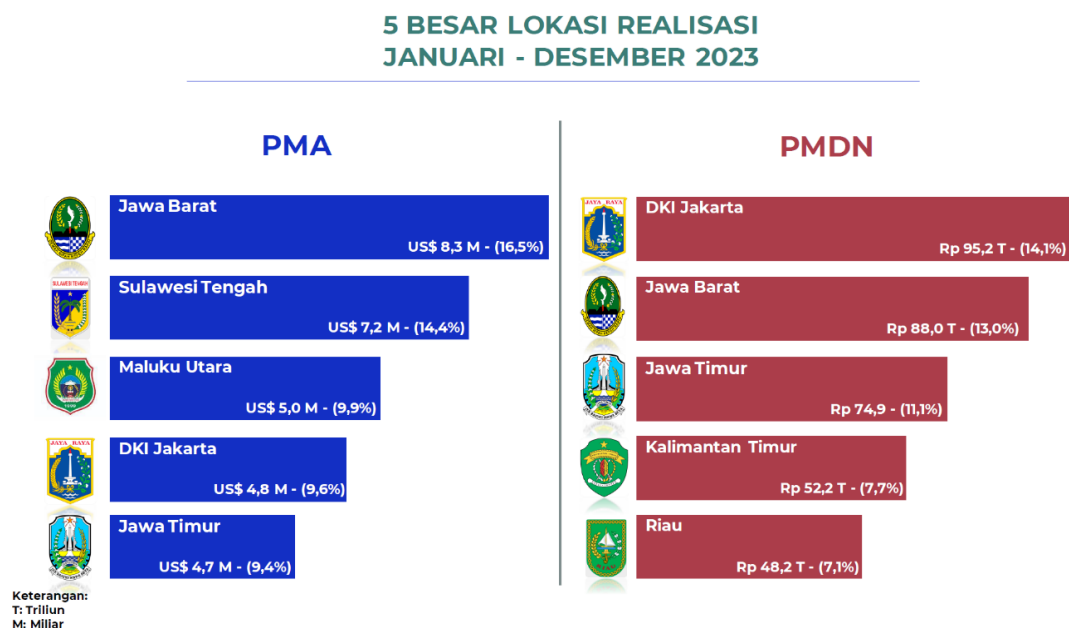
**Gambar 3.2** Capaian Realisasi Investasi Republik Indonesia Tahun 2023



Sumber : Press release realisasi investasi Republik Indonesia triwulan IV Tahun 2023

Kontribusi dari Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 71,89 (Triliun) untuk keseluruhan sektor. Target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi RI kepada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 64,5 triliun rupiah, maka Provinsi Kalimantan Timur telah **melampaui target dengan capaian sebesar 111,47%** dari target realisasi investasi pada tahun 2023. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur sebagai Provinsi dengan **peringkat tertinggi di Pulau Kalimantan dan menduduki peringkat ke-4 untuk kategori PMDN serta peringkat ke-10 untuk kategori PMA di skala nasional.**

**Gambar 3.3** Peringkat Realisasi Investasi Republik Indonesia Tahun 2023



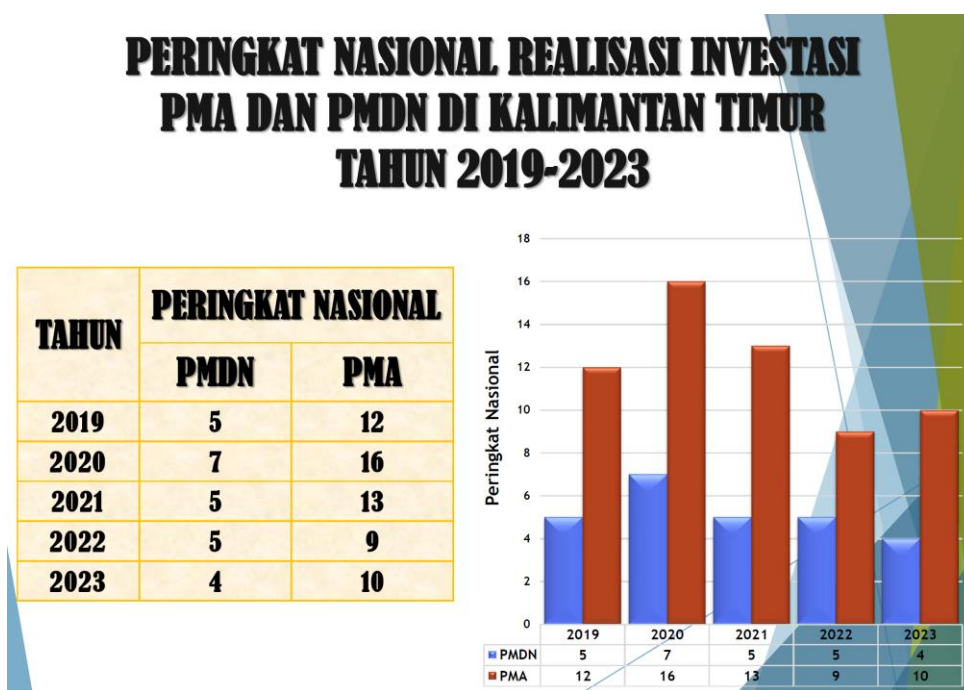
**Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2023**

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Milliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$. Juta)	PROYEK
1	DKI Jakarta	92.202,1	68.704	1	Jawa Barat	8.283,7	10.512
2	Jawa Barat	88.012,9	65.758	2	Sulawesi Tengah	7.244,1	397
3	Jawa Timur	74.937,4	28.484	3	Maluku Utara	4.988,2	224
<b>4</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>52.171,7</b>	<b>7.571</b>	4	DKI Jakarta	4.830,0	20.028
5	Riau	48.243,3	5.548	5	Jawa Timur	4.741,0	3.913
6	Banten	37.971,7	16.488	6	Banten	4.451,6	4.775
7	Jawa Tengah	32.987,2	17.460	7	Riau	2.042,3	600
8	Nusa Tenggara Barat	30.766,2	2.543	8	Jawa Tengah	1.563,7	3.021
9	Sumatera Selatan	25.602,4	5.667	9	Sumatera Selatan	1.478,6	456
10	Sumatera Utara	21.574,0	8.253	<b>10</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>1.332,7</b>	<b>822</b>

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM, 2023

Peringkat nasional realisasi investasi dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

**Gambar 3.4** Peringkat Nasional Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023



Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Akan Dilakukan**

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Nilai Realisasi Investasi memiliki target Rp. 35,67 Triliun dengan realisasi Rp. 49,59 Triliun (139,02 %). Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target 86 dengan realisasi 89,37 (103,91 %). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang

tercapai telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya serta dilaksanakannya kerjasama yang baik antara Tim Internal DPMPSTSP Prov. Kaltim, Perusahaan dan Instansi yang terkait. Meski demikian tentunya masih ada hambatan yang dihadapi, seperti sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi dari OPD terkait dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota serta banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban pelaporan LKPM.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel 3.5, indikator nilai investasi yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2019 nilai investasi sebesar 22,31 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan pada 3 tahun berikutnya, yaitu sebesar 25, 14 triliun pada tahun 2020; 31,64 triliun pada tahun 2021; 35,35 triliun pada tahun 2022 kemudian sebesar 49,59 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami rata – rata peningkatan investasi sebesar 11,74% dalam 4 (empat) tahun terakhir, sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Jika pada tahun 2020 nilai dari IKM adalah 86,70 mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan nilai IKM 89,69 dan menurun pada tahun 2023 dengan nilai IKM 89,37. Meskipun turun dari tahun sebelumnya, namun realisasi di tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan di RPJMD sebesar 104,05%.

Peningkatan kinerja indikator nilai realisasi investasi ini didukung oleh pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya serta dilaksanakannya kerjasama yang baik antara Tim Internal DPMPSTSP Prov. Kaltim, Perusahaan dan Instansi yang terkait yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Sedangkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penurunan di tahun terakhir disebabkan oleh perubahan regulasi terhadap kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan serta kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam

mengoperasikan system dan aplikasi perizinan.

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Dari tabel 3.6 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Investasi memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar Rp. 35,67 Triliun dengan realisasi Rp. 49,59 Triliun yang berarti melampaui target sebesar 139,02% dari target yang ada. Untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 86 dengan realisasi 89,37 atau 103,91%. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pendataan dan pengolahan data secara up to date dengan cara membangun sistem informasi yang berbasis online dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengisian sistem informasi LKPM Online per triwulan terhadap perusahaan serta melaksanakan sosialisasi pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan modal dengan Kab/ Kota. Kendala yang masih dihadapi antara lain sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi dari OPD terkait dan DPMPTSP Kabupaten/Kota serta banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban pelaporan LKPM.

- 4) Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Selain target yang ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, DPMPTSP Provinsi Kaltim juga memiliki target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi / BKPM RI. Untuk tahun 2022, target nilai investasi yang ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 51 triliun. Berdasarkan hasil Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI pada hari Selasa, 25 Januari 2024 realisasi investasi pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 71,89 (Triliun) untuk keseluruhan sektor. Maka, Provinsi Kalimantan Timur telah melampaui target dengan capaian sebesar 111,47% dari target realisasi investasi pada tahun 2023. Disampaikan juga bahwa Provinsi Kalimantan Timur menduduki **peringkat ke-4 untuk kategori PMDN dan peringkat ke-10 untuk kategori PMA.**

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.8** Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		( $\geq 100\%$ )		
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	139,02%	95,21%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	103,91%	83,56%	Efisien

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2023 dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efesiensi antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran cukup baik. Pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak hanya di tunjang oleh anggaran yang di sediakan akan tetapi merupakan sinergitas bersama stakeholder bidang perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

## 7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu, dan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut analisis yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sasaran

strategis yang telah dimuat pada laporan Perjanjian Kinerja :

**a) Analisis faktor penunjang keberhasilan kinerja**

- 1) Dikarenakan adanya dukungan dari pengalokasian anggaran yang tercukupi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Dalam rangka mendukung pengembangan industri hilir di Kalimantan Timur dan memberikan gambaran arah penanaman modal Kaltim kepada calon investor, DPMPTSP Provinsi Kaltim di tahun 2023 telah melakukan penyusunan pemetaan IPRO (Investment Project Ready to Offer) di Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu, Paser dan Penajam Paser Utara serta penyusunan peluang investasi hilirisasi karet dan turunannya
- 3) Pemberian insentif bagi investor yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah provinsi dalam bentuk insentif pengurangan, keringan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan
- 4) Sosialisasi pemberian kemudahan berusaha, kemudahan berusaha yang ditawarkan berupa Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, percepatan pemberian perizinan
- 5) Telah dilakukan optimalisasi upaya promosi investasi melalui kegiatan penyusunan strategi dan sasaran promosi investasi Kalimantan Timur, Mahakam Investment Forum, serta promosi melalui media sosial.
- 6) Menjalani kerjasama dengan Bank Indonesia melalui *Regional Investor Relations Unit (RIRU)* untuk melakukan penyusunan Profiling Investasi Kaltim (PIKAT). Hasil dari PIKAT ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi calon investor dalam menanamkan modalnya di Kaltim. Hasil dari PIKAT ini juga telah dipromosikan dalam event-event nasional dan regional.
- 7) Untuk pencatatan realisasi investasi, dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan dievaluasi terhadap perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur.
- 8) Melakukan pendataan dan pengolahan data secara *up to date* dengan cara membangun sistem informasi yang berbasis online

dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengisian sistem informasi LKPM Online per triwulan terhadap perusahaan serta melaksanakan sosialisasi pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan modal dengan Kab/ Kota.

- 9) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memiliki legalitas atas kegiatan usahanya, maka dilakukan sosialisasi dan pendampingan penerbitan NIB serta kegiatan pengelolaan PTSP pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan.
- 10) Penyampaian informasi terkait kemudahan persyaratan dan prosedur perizinan secara rutin melalui media sosial
- 11) Di tahun 2023, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur juga menjalin kerjasama dengan *English First* untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam berbahasa asing.

#### **b) Analisis faktor penghambat keberhasilan kinerja**

- 1) Sulitnya memperoleh data potensi dan peluang investasi terbaru dari DPMPTSP Kabupaten/Kota Se – Kaltim karena masih belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah menyusun kajian IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang tentunya hal ini menyulitkan dalam penyusunan kajian potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan kolaborasi dengan dinas teknis dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, mengalokasikan anggaran untuk bimbingan teknis dan penyusunan kajian IPRO bagi Kabupaten/Kota.
- 2) Kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi perizinan. Masih banyak pelaku usaha / pemohon izin yang belum mahir dalam mengoperasikan sistem dan aplikasi perizinan sehingga pemrosesan izin terkesan rumit bagi pemohon itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan penerbitan izin.
- 3) Adanya perubahan regulasi yang dinamis terhadap kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan. Tentunya hal ini cukup merepotkan sehingga menghambat proses layanan perizinan. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan.

- 4) Pencatatan realisasi investasi dilakukan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha, namun banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui atau melakukan kewajiban penyampaian LKPM membuat pencatatan realisasi investasi tersebut tidak optimal. Upaya mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan bimtek, sosialisasi dan pengawasan ke pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
- 5) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan aplikasi SP4N Lapor yang digunakan sebagai sarana pengaduan sesuai amanat KEMENPAN-RB. Oleh karena itu akan dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi SP4N Lapor tersebut kepada seluruh perangkat DPMPSTSP Kab/Kota terutama kepada masyarakat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### D. Realisasi Anggaran

##### 1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

**Tabel 3.9** Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	35,67 Triliun Rp	49,59 Triliun Rp	139,02 %	Rp 3.572.052.600	Rp 2.422.036.402	67,74%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik	86 Indeks	89,37 Indeks	103,91 %	Rp 3.724.370.000	Rp 3.493.553.516	93,80%
Jumlah					Rp 6.752.718.524	Rp 6.190.173.628	91,67%

Sumber : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022; 2. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023; 3. Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

Pada tabel 3.9 diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja terlaksana dengan baik, dan mengenai target yang sudah ditentukan, yaitu



Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara yang dimana diketahui memiliki target Rp. 35,67 Triliun dan pada saat *Press Release* Tw. IV realisasi nilai investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara mencapai Rp. 49,59 Triliun dengan pencapaian kinerja 139,02% dan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik memiliki target 86 dan realisasinya yaitu 89,37 dengan capaian kinerja 103,91% .

## 2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun anggaran 2023 telah dialokasikannya anggaran di 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, maka dijabarkan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

### 2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini diampu oleh Sekretariat DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur. Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

**Tabel 3.10** Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.122.796.887</b>	<b>20.991.030.813</b>	<b>87,01%</b>	<b>99,57%</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	768.111.800	613.304.003	79,84	86,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	368.057.800	341.511.746	92,78	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.054.000	271.792.257	67,93	74,52
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	13.581.556.910	11.436.997.687	84,20	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.604.139.550	7.680.927.315	79,97	100

	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	3.3765.497.360	3.560.461.572	94,55	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	211.920.000	195.608.800	92,30	100
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	15.840.000	15.840.000	100	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	15.840.000	15.840.000	100	100
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	432.965.500	384.938.000	88,90	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	349.948.600	314.318.000	89,81	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.016.900	70.620.000	85,06	100
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	4.137.709.077	3.753.833.475	90,72	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.910.700	24.712.000.000	95,37	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.561.600	15.534.250	99,82	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	308.845.000	302.156.800	97,83	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000	17.964.000	92,63	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.368.000.000	1.125.866.425	82,30	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.399.999.777	2.267.600.000	94,84	100
6.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.994.826.600	2.992.132.600	97,57	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	226.604.260	224.995.000	99,28	99,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.768.222.340	2.697.137.600	97,43	99,99
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.210.756.200	1.026.358.734	84,77	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.874.200	354.964.734	80,15	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.700.000	249.330.000	98,66	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.182.000	422.064.000	81,92	100
8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	981.030.800	837.626.314	85,38	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	346.342.000	295.716.454	85,38	100

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.060.000	202.919.500	72,19	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.072.400	48.574.000	86,62	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	297.556.400	290.416.360	97,60	100
	<b>Jumlah</b>	<b>24.122.796.887</b>	<b>20.991.030.813</b>	<b>87,01%</b>	<b>99,57%</b>

Sumber : Dari DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

Pada tahun 2023 program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp 24.122.796.887,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.991.030.813,00 atau 87,01% dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,57%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp16.246.543.516,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.744.487.297,00 atau 29,20%.

Pada tabel 3.10 di atas pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki pagu sebesar Rp 768.111.800,00 dengan realisasi Rp 613.304.003,00 (79,84%), Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki pagu sebesar Rp 13.581.556.910,00 dengan realisasi Rp 11.436.997.687,00 (84,20%), Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah memiliki pagu sebesar 15.840.000,00 dengan realisasi 15.840.000,00 (100%), Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki pagu sebesar Rp 432.965.500,00 dengan realisasi Rp 384.938.000,00 (88,90%), Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki pagu sebesar Rp 4.137.709.077,00 dengan realisasi Rp 3.753.833.475,00 (90,72%), Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.994.826.600,00 dengan realisasi Rp Rp 2.922.132.600.000,00 (97,57%), Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 1.210.756.200,00 dengan realisasi Rp 1.026.358.734,00 (84,77%), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 981.030.800,00 dengan realisasi Rp 837.626.314,00 (85,38%).

Masih terdapat sisa anggaran yang disebabkan adanya efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran yang tidak dapat terserap secara maksimal khususnya pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi keuangan sebesar 67,93%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan berupa honor tim, dikarenakan tim penilaian yang tidak melakukan penilaian di tahun 2023 serta direncanakan tim melibatkan Kementerian dan instansi vertikal terkait, namun berdasarkan pembahasan di Radalok tidak diperkenankan memberikan honor pada tim penilaian tersebut dikarenakan telah mendapatkan honor dari instansi asalnya.

Untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan berkurangnya jumlah pegawai ASN sebab pensiun dan mutasi serta tidak tercapainya target penambahan jumlah pegawai ASN di tahun 2023. Sedangkan untuk sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sisa anggaran berasal dari pemeliharaan handy talky, kamera, kulkas, mebel, mesin ketik, scanner, televisi, UPS dikarenakan harga satuan di DPA yang cukup tinggi yaitu senilai Rp 9.750.000/unit dan realisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan.

## **2.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan program yang mendukung sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara. Program ini diampu oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki 1 (satu) kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah teridentifikasinya dan tersedianya informasi terkait peluang investasi di Kalimantan Timur. Anggaran program ini sebesar Rp3.000.000.000,00 atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.923.159.767,00 atau 97,43%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.328.355.585,00

maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.594.804.182,00 atau 120,06%.

Pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi anggaran yang tersedia senilai Rp 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar 685.988.048,00 (97,99%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Bimtek Penyusunan IPRO, Sosialisasi Pemberian Fasilitas Kemudahan Berusaha, Workshop Penyusunan RUPM, dan Penyusunan Buletin Investasi.

Untuk sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi, anggaran yang tersedia senilai Rp 2.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar 2.237.171.719,00 (97,26%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Bimtek Potensi Investasi Regional, FGD pemilihan dan Penetapan Sektor Unggulan Daerah Kalimantan Timur, FGD Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri dan KEK, FGD Investasi di Sektor Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, kegiatan BIMP EAGA, Rapat Pembahasan IPRO Kabupaten Kutai Barat, Mahulu, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan Paser, Rapat Pembahasan Peluang Investasi Hilirisasi Karet dan produk turunannya.

**Tabel 3.11** Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
II	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.923.159.767</b>	<b>97,43</b>	100
1	<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	3.000.000.000	2.923.159.767	97,43	100
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	700.000.000	685.988.048	97,99	100
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	2.300.000.000	2.237.171.719	97,26	100

Sumber : Dari DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

### **2.3 Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal merupakan program yang

mendukung sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Outcome yang diharapkan dari Program Promosi Penanaman Modal adalah menarik minat investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur. Program ini diampu oleh Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Pada program ini dianggarkan sebesar Rp3.572.484.840,00 pada Program Promosi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.182.950.772,00 atau 89,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.633.953.441,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.548.997.331,00 atau 94.80%.

Pada sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi anggaran yang tersedia senilai Rp 1.546.533.640,00 dan terealisasi sebesar 1.424.376.046,00 (92,10%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Forum Penyusunan Sasaran Strategi dan Promosi Investasi Kaltim, Promosi Investasi Kalimantan Timur di Media Sosial, dan Promosi Investasi di Luar Negeri. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Investasi / BKPM RI juga dilaksanakan Sosialisasi Tata Cara Kemitraan Pelaku Usaha dan UMKM di Daerah.

Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, anggaran yang tersedia senilai Rp 2.025.951.200,00 dan terealisasi sebesar 1.758.574.726,00 (86,80%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Forum Investasi Daerah, Forum Promosi Daerah, Mahakam Investment Forum, Rapat Pembahasan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta ikut serta dalam kegiatan Pameran/Expo baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

**Tabel 3.12** Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal

No		Anggaran	Keterangan
----	--	----------	------------

	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3.572.484.840</b>	<b>3.182.950.772</b>	<b>89,09</b>	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.572.484.840	3.182.950.772	89,09	100
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.546.533.640	2.025.951.200	92,10	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2.300.000.000	2.237.171.719	97,26	100

Sumber : Dari DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

#### **2.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diampu oleh Bidang Pengendalian Pelaksanaan juga merupakan program yang mendukung sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Outcome yang diharapkan dari Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), terakomodirnya permasalahan/ kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta tercapainya Target Realisasi Investasi. Dengan anggaran senilai Rp3.575.025.600,00 terealisasi sebesar Rp2.422.036.402,00 atau 67,74%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.514.550.604,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp907.485.798,00 atau 59,92%.

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal anggaran yang tersedia senilai Rp 1.449.425.600,00 terealisasi sebesar 1.346.683.831,00 (92,91%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara

lain Kegiatan Sosialisasi Pelaporan LKPM OSS Berbasis Risiko kepada pelaku usaha sektor Primer, Sekunder, Tersier serta Sosialisasi Pelaporan LKPM pada pelaku usaha. Di tahun 2023 ini telah dilaksanakan kegiatan Penganugerahan *Investment Award* dan *LKPM Award* Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan kepada investor atau pelaku usaha yang dengan capaian realisasi investasi terbesar dan DPMPSTSP Kab/Kota dengan capaian tertinggi. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memotivasi para pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan nilai realisasi investasi di Kalimantan Timur.

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, anggaran yang tersedia senilai Rp 861.650.000,00 dan terealisasi sebesar 490.026.153,00 (56,87%) dengan realisasi fisik sebesar 70,34%. Realisasi yang masih cukup jauh dari target ini dikarenakan adanya pergeseran dana DAK dari sub kegiatan pengawasan, sehingga untuk perjalanan dinas untuk di sub kegiatan pembinaan dari anggaran APBD murni dan dari dana DAK yang ada di sub kegiatan Pembinaan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sehingga kegiatan yang dapat direalisasikan adalah..

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal anggaran yang tersedia senilai Rp 1.263.950.000,00 dan terealisasi sebesar 585.326.418,00 (46,30%) dengan realisasi fisik sebesar 75,93%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Bimtek Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Minimnya realisasi di sub kegiatan ini disebabkan oleh:

- Adanya kegiatan pembuatan video promosi yang bersumber dari DAK Sebesar Rp. 250.000.000,-, berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan (Juknis) Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang terbitkan oleh BKPM RI, video promosi tersebut harus berdasarkan iPRO, sedangkan iPRO peluang investasi yang akan dibuat video promosi untuk tahun 2023 masih dalam perencanaan.
- Adanya pergeseran perjalanan dinas dari luar daerah ke dalam daerah dana DAK sebesar Rp. 243.000.000,-, karena berdasarkan Juknis yang dikeluarkan oleh BKPM RI dana DAK untuk perjalanan



dinas luar daerah tidak diperbolehkan, sehingga harus dilaksanakan pergeseran, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu penetapan pergeseran anggaran maka dengan waktu yang tersisa tidak maksimal dalam penyerapan anggaran, sehingga anggaran tersebut dapat direalisasikan.

- Sudah diterbitkannya DPA SKPD, baru Juknis DAK diterbitkan sehingga harus dilaksanakan pergeseran anggaran sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada kegiatan tersebut.

**Tabel 3.13** Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>3.575.025.600</b>	<b>2.422.036.402</b>	<b>67,74</b>	84,34
1	<i>Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</i>	3.575.025.600	2.422.036.402	67,74	84,34
	Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.449.425.600	1.346.683.831	92,91	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	861.650.000	490.026.153	56,87	70,34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.263.950.000	585.326.418	46,30	75,93

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

## **2.5 Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program yang mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik. Program ini memiliki 1 (satu) kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu Penyediaan Pelayanan

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah serta Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha untuk memiliki legalitas atas kegiatan usahanya. DPMPTSP Provinsi Kaltim Timur menganggarkan sebesar Rp3.724.370.000,00 pada Program Pelayanan Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.493.553.516,00 atau 93,80%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.372.443.216,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.121.110.300,00 atau 154,55%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik anggaran yang tersedia senilai Rp 1.214.370.000,00 terealisasi sebesar 1.087.641.449,00 (89,56%) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Penerapan Sistem E – PTSP dalam Penyelenggaraan Sistem Perizinan dan Non Perizinan, Sosialisasi dan Pendampingan Penerbitan NIB di Kabupaten PPU dan Berau.

Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal anggaran yang tersedia senilai Rp 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 971.027.121.000,00 (97,10%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 98%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pengelolaan PTSP Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan, Rapat Koordinasi Evaluasi Pemenuhan Komitmen Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah anggaran yang tersedia senilai Rp 820.000.000,00 terealisasi sebesar 752.314.677,00 (91,74%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 98%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Fasilitasi Perizinan dan Non Perizinan

Sektor ESDM, Kehutanan dan Perkebunan.

Pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan anggaran yang tersedia senilai Rp 690.000.000,00 teralisasi sebesar Rp 682.570.269,00 (98,92%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan Perangkat Daerah Teknis Terkait se – Kab/Kota Kalimantan Timur. Meskipun sub kegiatan ini termasuk dalam Program Pelayanan Penanaman Modal, namun pelaksanaannya oleh Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan.

**Tabel 3.14** Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Fisik %
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>3.724.370.000</b>	<b>3.493.553.516</b>	<b>93,80</b>	99,46
1	<i>Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.</i>	3.724.370.000	3.493.553.516	93,80	99,46
	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	1.214.370.000	1.087.641.449	89,56	100
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal	1.000.000.000	971.027.121	97,01	98
	Penyediaan layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan	690.000.000	682.570.269	98,92	100
	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	820.000.000	752.314.677	91,74	100

Sumber : DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

## **2.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman**

### **Modal**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu, kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Outcome yang diharapkan dari Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah optimalisasi teknologi dalam penyampaian informasi terkait investasi dan perizinan. Program ini diampu oleh Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan. DPMPTSP Provinsi Kaltim menganggarkan sebesar Rp1.155.206.000,00 pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.095.261.434,00 atau 94,81%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp409.885.465,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp685.375.969,00 atau 167,21%.

Pada sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik anggaran yang tersedia senilai Rp 1.155.206.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.095.261.434,00 (94,81%). Tentunya hasil ini sangat baik dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan antara lain FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Kab/Kota se Kalimantan Timur, Podcast dan Investment Goes to Campus serta pengembangan/pemeliharaan aplikasi perizinan e – PTSP.

**Tabel 3.15** Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>1.155.206.000</b>	<b>1.095.261.434</b>	<b>94,81</b>	<b>100</b>
1	<i>Urusan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada</i>	1.155.206.000	1.095.261.434	94,81	100

<i>Tingkat Daerah Provinsi.</i>				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.155.206.000	1.095.261.434	94,81	100

Sumber :DPA/DPPA dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 kami buat berdasarkan realita yang ada.

Dari uraian tersebut serta dari hasil capaian kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil (*outcome*) sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal memang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat sehingga program/kegiatan yang telah disusun pada tahun berikutnya dapat terealisasi dengan tingkat persentasi yang semakin tinggi.



*Berani Untuk Katim Berdaulat*

## Press Release Triwulan IV Tahun 2023

### DAFTAR ISI

#### Realisasi Investasi Berdasarkan :



Oktober - Desember Tahun 2023



Sektor, Lokasi dan Negara Asal  
Oktober - Desember Tahun 2023



Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dan  
Tenaga Kerja Asing Oktober - Desember  
Tahun 2023



Perkembangan Realisasi Investasi  
Oktober-Desember Tahun 2023



Sektor, Lokasi dan Negara Asal  
Oktober - Desember Tahun 2023



Realisasi Investasi PMA dan PMDN untuk  
Non Migas dan Non Pertambangan

**MARI BERINVESTASI DI KALIMANTAN TIMUR**

## REALISASI INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2023

Target realisasi investasi tahun 2023 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 64,5 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2023 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 22,14 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 16,01 Triliun (3.254 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$ 414,08 Juta atau sebesar Rp 6,12 Triliun (461 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 22,14 Triliun dibandingkan Triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 16,55 Triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 5,58 Triliun atau sebesar 25,23%. Jika dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 64,5 Triliun maka untuk Triwulan IV mencapai 34,34%. Sedangkan jika dikumulatifkan realisasi investasi dari bulan Januari-Desember tahun 2023 sebesar Rp 71,89 Triliun atau 111,47% dari target realisasi investasi pada tahun 2023.

### A. Realisasi Investasi

#### 1. Realisasi Investasi PMDN

##### 1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN Triwulan IV tahun 2023 mencapai Rp 16,01 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 3.254, dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 7,63 Triliun atau 47,64% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Investasi terbesar kedua sebesar Rp 1,83 Triliun atau 11,43% berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Berau menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 1.62 Triliun atau 10,17%.

Terkait penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling banyak penyerapannya yaitu sebanyak 1.956 orang, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1.453 orang, dan Kabupaten Berau sebanyak 1.272 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja asing sebanyak 5 orang pada triwulan ini.

**Tabel 1**

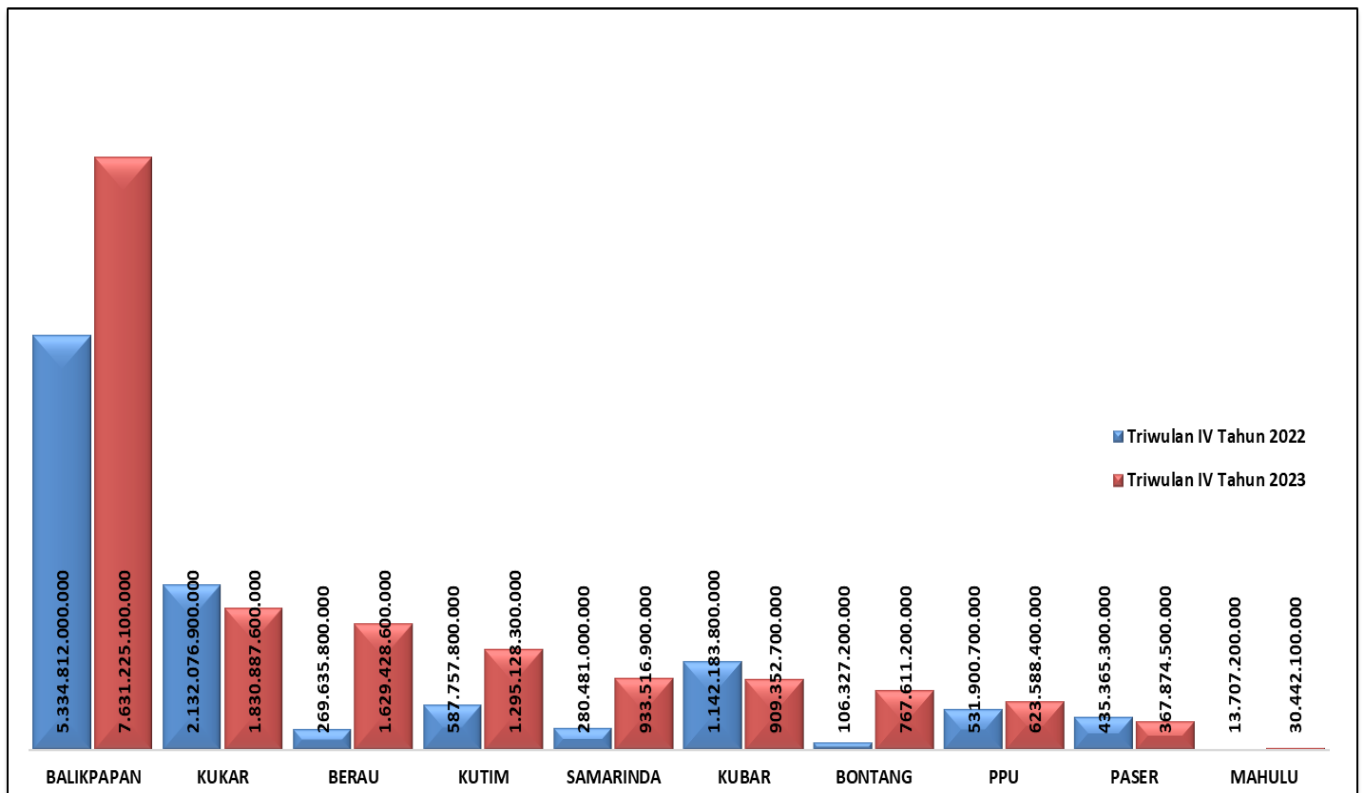
**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2023**

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	985	7.631.225.100.000	760	3
2	Kutai Kartanegara	566	1.830.887.600.000	1.453	1
3	Berau	207	1.629.428.600.000	1.272	-
4	Kutai Timur	263	1.295.128.300.000	1.956	-
5	Samarinda	680	933.516.900.000	877	-
6	Kutai Barat	149	909.352.700.000	408	1
7	Bontang	130	767.611.200.000	94	-
8	Penajam Paser Utara	77	623.588.400.000	52	-
9	Paser	184	367.874.500.000	436	-
10	Mahakam Hulu	13	30.442.100.000	131	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.254</b>	<b>16.019.055.400.000</b>	<b>7.439</b>	<b>5</b>

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim



**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Lokasi**



Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

**1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha**

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 7,54 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 47,11%. Pertambahan sebagai kontributor kedua mencapai Rp. 3,37 Triliun atau 21,07%. Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan kontributor ketiga mencapai Rp. 1,37 Triliun atau 8,61%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 21 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2023.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 2.592 orang atau 34,84% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan investasi PMDN. Selanjutnya subsektor Pertambangan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.407 orang atau 32,36% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia yang terserap. Subsektor Transportasi, Gudang dan Komunikasi menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 595 orang atau 8,00%

**Tabel 2**

**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2023**

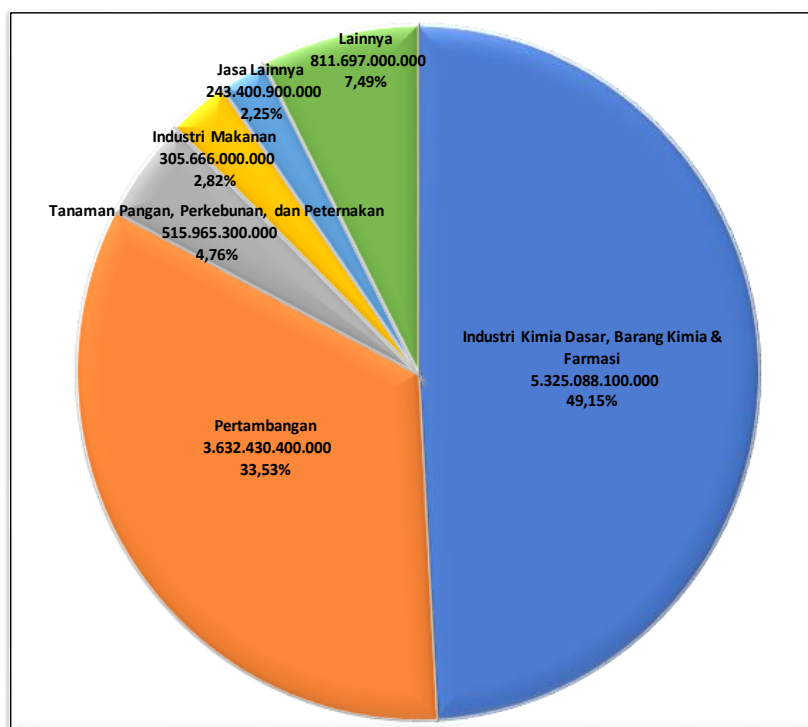
NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	173	1.379.802.700.000	2.592	-
2	Kehutanan	130	125.115.200.000	77	-
3	Perikanan	2	-	-	-
4	Pertambangan	369	3.374.650.800.000	2.407	2

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
1	Industri Makanan	104	1.333.131.900.000	374	-
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	15	86.418.900.000	2	-
5	Industri Kertas & Percetakan	5	-	2	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	38	7.547.191.000.000	225	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	7	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	25	5.632.000.000	6	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	11	168.926.400.000	21	3
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	23	30.386.600.000	20	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	25	173.571.400.000	118	-
12	Industri Lainnya	38	1.714.100.000	42	-
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
1	Listrik, Gas dan Air	62	383.212.900.000	9	-
2	Konstruksi	455	62.850.500.000	160	-
3	Perdagangan & Reparasi	727	146.120.200.000	181	-
4	Hotel & Restoran	155	165.926.200.000	63	-
5	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	359	428.716.700.000	595	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	76	336.656.300.000	37	-
7	Jasa Lainnya	455	269.031.600.000	508	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.254</b>	<b>16.019.055.400.000</b>	<b>7.439</b>	<b>5</b>

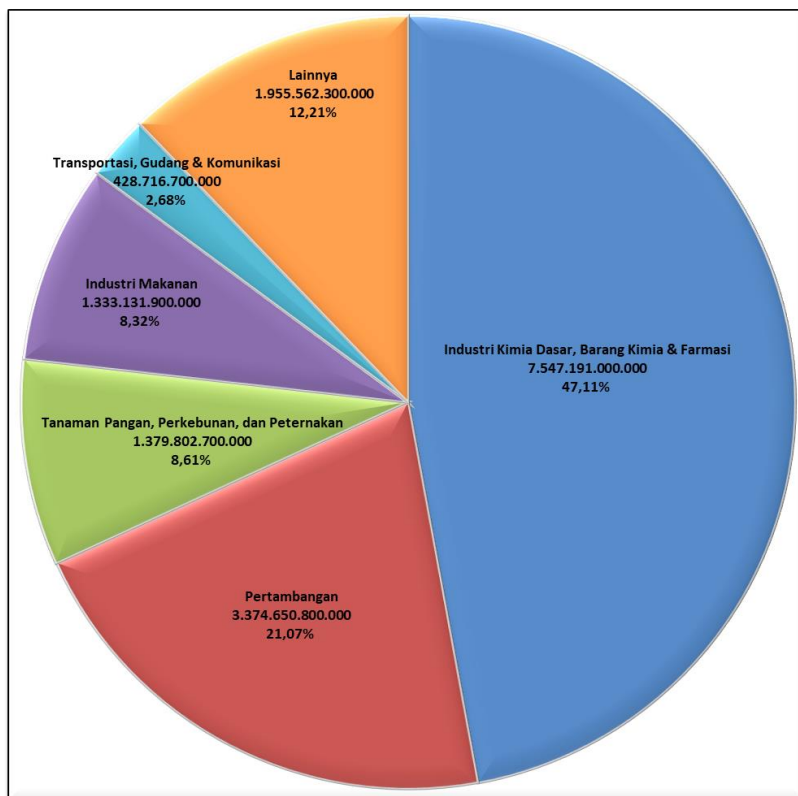
Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

## Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Triwulan IV Tahun 2022 & Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Sektor Usaha

### a. Triwulan IV Tahun 2022



## b. Triwulan IV Tahun 2023



## 2. Realisasi Investasi PMA

### 2.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Triwulan IV tahun 2023 mencapai US\$ 414,08 Juta atau sebesar Rp 6,12 Triliun, dengan sebaran yang berada di 10 kabupaten/kota. Kota Balikpapan memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$ 133,59 Juta atau sebesar Rp 1,97 Triliun (32,26% dari total realisasi PMA), terdiri atas 197 proyek PMA. Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 109,77 Juta atau sebesar Rp 1,62 Triliun (26,51%). Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$ 90,35 Juta atau sebesar Rp 1,33 Triliun (21,82%).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 857 orang, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 493 orang, dan Kabupaten Paser sebanyak 212 orang. Sedangkan penyerapan tenaga kerja asing sebanyak 293 orang pada triwulan ini.

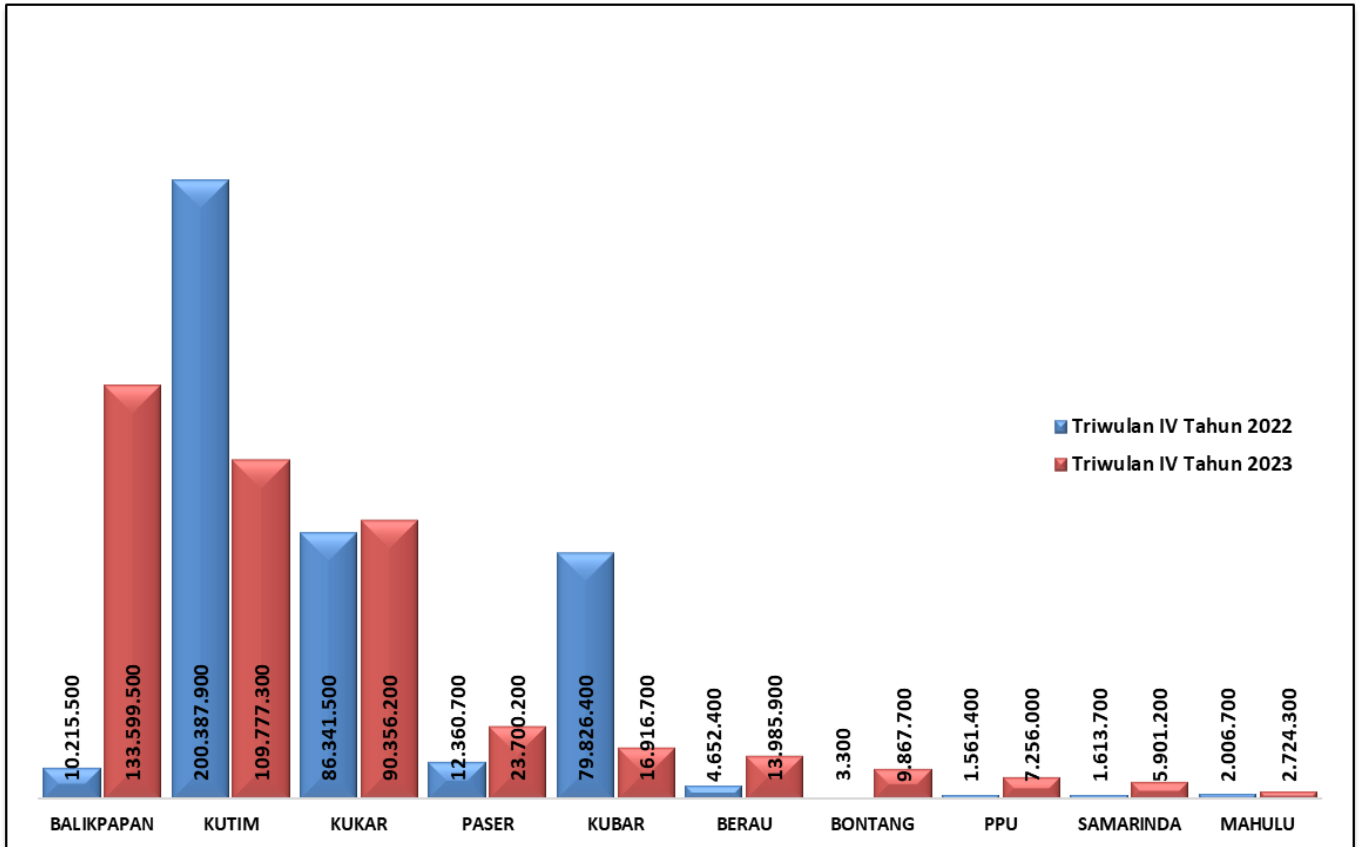
**Tabel 3**

**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember 2023**

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	197	133.599.500	135	-
2	Kutai Timur	46	109.777.300	493	270
3	Kutai Kartanegara	49	90.356.200	857	21
4	Paser	19	23.700.200	212	1
5	Kutai Barat	27	16.916.700	160	1
6	Berau	30	13.985.900	149	-
7	Bontang	8	9.867.700	6	-
8	Penajam Paser Utara	12	7.256.000	-	-
9	Samarinda	48	5.901.200	89	-
10	Mahakam Hulu	25	2.724.300	12	-
<b>TOTAL</b>		<b>461</b>	<b>414.085.000</b>	<b>2.113</b>	<b>293</b>

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim  
Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.800,-

**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Lokasi**



Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

- Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.800,-

**2.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha**

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Transportasi, Gudang & Komunikasi mendapatkan tambahan investasi terbesar yaitu US\$ 115,91 Juta (Rp 1,66 Triliun) atau sebesar 27,99% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi investasi di wilayah ini adalah Pertambangan yaitu sebesar US\$ 100,55 Juta (Rp 1,44 Triliun) atau 24,28% dan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar US\$ 61,58 Juta (Rp 883,72 Miliar) atau 14,87%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 18 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMA pada Triwulan IV tahun 2023.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 1.103 orang atau 52,20% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan investasi PMA. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Pertambangan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 279 orang atau mencapai 13,20% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap. Disusul subsektor Industri Logam Dasar, barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak **223** orang atau mencapai 10,55% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap.

**Tabel 4**  
**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	57	61.583.400	1.103	4
2	Kehutanan	7	7.390.400	134	-
3	Perikanan	1	-	-	-
4	Pertambangan	81	100.558.800	279	-

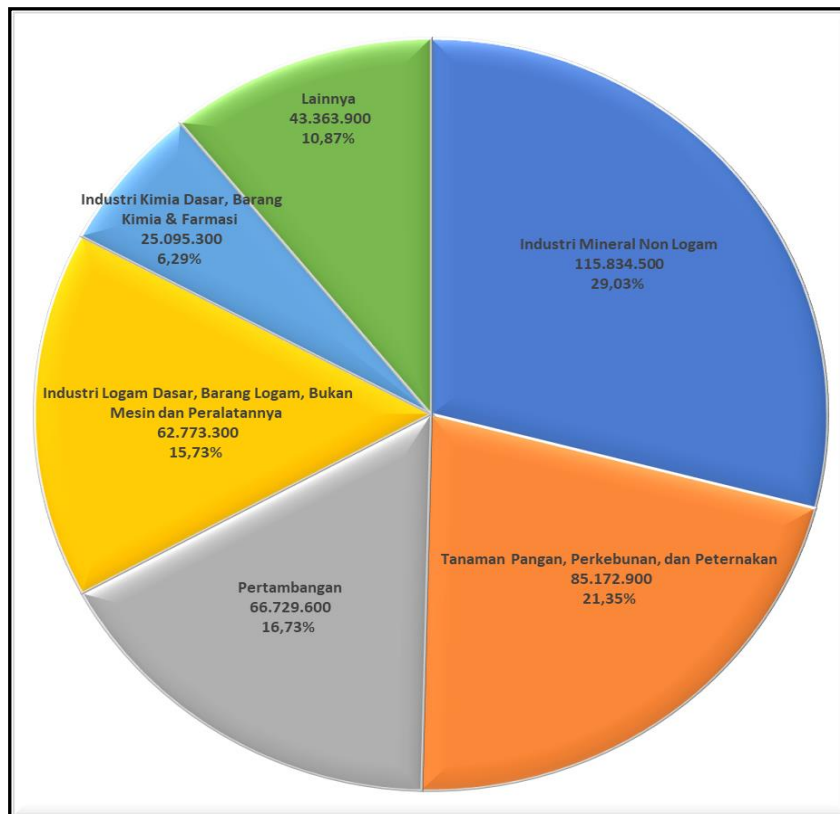
II SEKTOR SEKUNDER					
1	Industri Makanan	64	31.766.700	41	4
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	1	-	-	-
5	Industri Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	7	16.705.800	-	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	2	3.300	3	-
8	Industri Mineral Non Logam	1	35.199.500	114	267
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	19	34.862.900	223	16
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	8	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	3	-	-	-
12	Industri Lainnya	1	-	-	-
III SEKTOR TERSIER					
1	Listrik, Gas dan Air	2	-	-	-
2	Konstruksi	5	27.400	3	-
3	Perdagangan & Reparasi	81	782.300	8	-
4	Hotel & Restoran	43	831.500	139	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	37	115.912.500	14	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	5	3.151.000	6	-
7	Jasa Lainnya	36	5.309.500	46	2
<b>TOTAL</b>		<b>461</b>	<b>414.085.000</b>	<b>2.113</b>	<b>293</b>

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

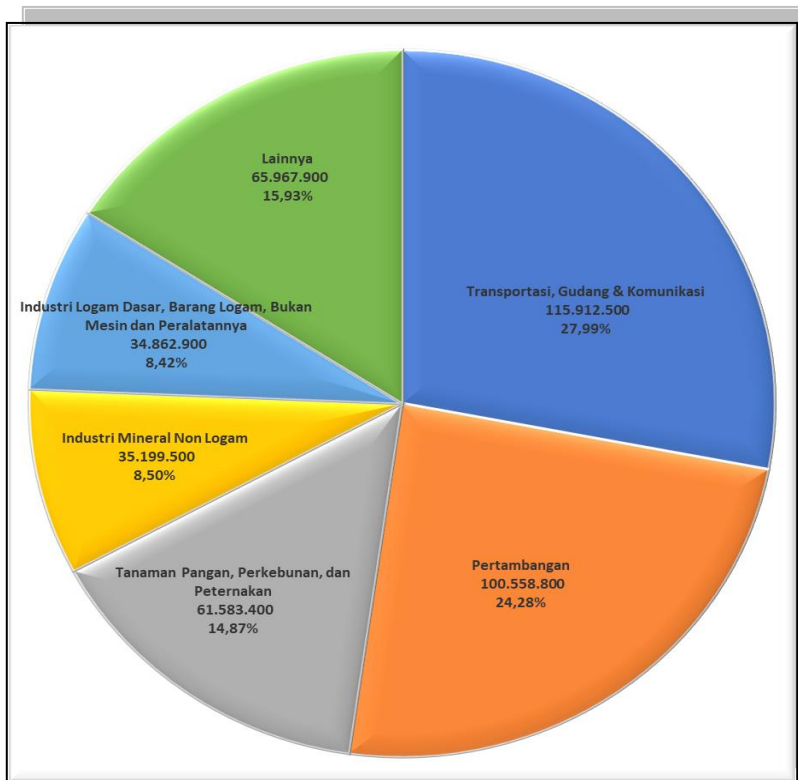
• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.800,-

## Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA Triwulan IV Tahun 2022 & Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Sektor Usaha

### a. Triwulan IV Tahun 2022



## b. Triwulan IV Tahun 2023



### 2.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara

Sampai dengan akhir triwulan IV, dilihat dari asal Negara investor (pada tabel 5), menunjukkan bahwa 21 Negara yang terdaftar menempatkan Negara R.R. Tiongkok, Singapura dan Malaysia sebagai 3 negara yang merealisasikan investasinya relatif lebih besar dari negara lainnya. Investor asal Singapura telah merealisasikan investasinya senilai nilai US\$ 177,106 Juta (Rp 2,54 Triliun) atau 44,39% dari total nilai investasi pada 9 proyek. Investor Singapura merealisasikan investasinya senilai US\$ 105,28 Juta (Rp. 1,51 Triliun) atau 26,39% pada 72 proyek, sedangkan investor dari Malaysia merealisasikan investasinya senilai US\$ 40,36 Juta (Rp 579,25 Miliar) atau 10,12% pada 51 proyek.

Tabel 5

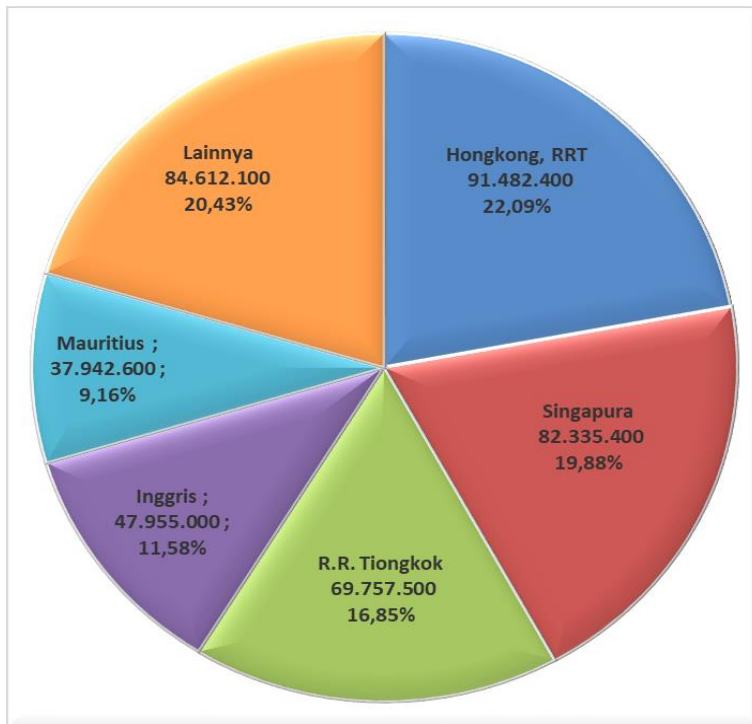
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Oktober-Desember Tahun 2023

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	Hongkong, RRT	18	91.482.400	1.353.939.520.000	22,09%
2	Singapura	164	82.335.400	1.218.563.920.000	19,88%
3	R.R. Tiongkok	10	69.757.500	1.032.411.000.000	16,85%
4	Inggris	15	47.955.000	709.734.000.000	11,58%
5	Mauritius	2	37.942.600	561.550.480.000	9,16%
6	Malaysia	68	24.746.000	366.240.800.000	5,98%
7	Korea Selatan	9	21.475.500	317.837.400.000	5,19%
8	Australia	34	14.825.000	219.410.000.000	3,58%
9	Kepulauan Virgin Inggris	29	11.039.800	163.389.040.000	2,67%
10	Seychelles	6	7.050.400	104.345.920.000	1,70%
11	Thailand	12	2.261.100	33.464.280.000	0,55%
12	India	6	1.939.900	28.710.520.000	0,47%
13	Swiss	10	522.100	7.727.080.000	0,13%
14	Uni Emirat Arab	4	396.000	5.860.800.000	0,10%
15	Jepang	31	157.600	2.332.480.000	0,04%
16	Belanda	7	116.600	1.725.680.000	0,03%
17	Bangladesh	2	48.700	720.760.000	0,01%
18	Kanada	11	30.600	452.880.000	0,01%
19	Perancis	2	2.800	41.440.000	0,00%
20	Amerika Serikat	3	-	-	0,00%

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
21	Denmark	1	-	-	0,00%
22	Gibraltar	7	-	-	0,00%
23	Luxembourg	1	-	-	0,00%
24	Qatar	1	-	-	0,00%
25	Spanyol	1	-	-	0,00%
26	Swaziland	1	-	-	0,00%
27	Swedia	6	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>461</b>	<b>414.085.000</b>	<b>6.128.458.000.000</b>	<b>100%</b>

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPSTSP Prov. Kaltim

### Grafik Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara Triwulan IV Tahun 2023



### 3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan dari bulan Oktober-Desember 2023, realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 22,14 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 16,01 Triliun dan PMA sebesar Rp 6,12 Triliun, yang jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2023 mencapai angka 34,34%, dengan total proyek sebanyak 3.175 dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 9.850 orang yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 9.552 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 298 orang.

Tabel 6

#### Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Oktober-Desember Tahun 2023

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	16.019.055.400.000	3.254	7.444
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	414.085.000		
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	6.128.458.000.000	461	2.406
<b>TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2</b>		<b>22.147.513.400.000</b>	<b>3.715</b>	<b>9.850</b>

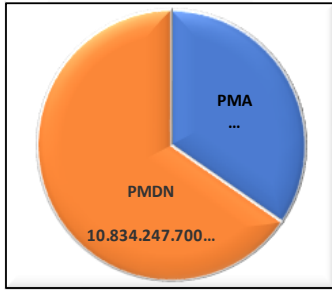
Keterangan : \*) Dikonversikan pada kurs Rp 14.800,-/US\$

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur

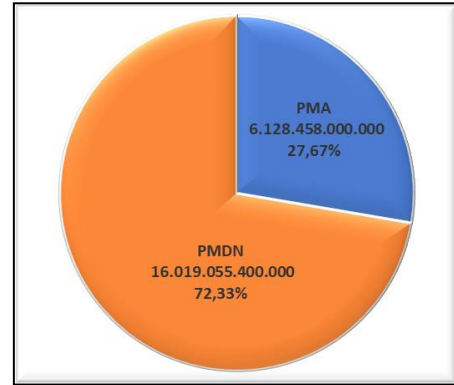


## Perbandingan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

### a. Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2022

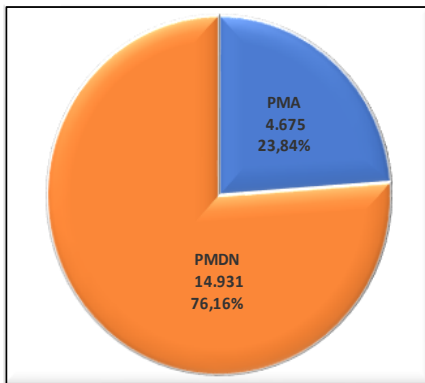


### b. Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023

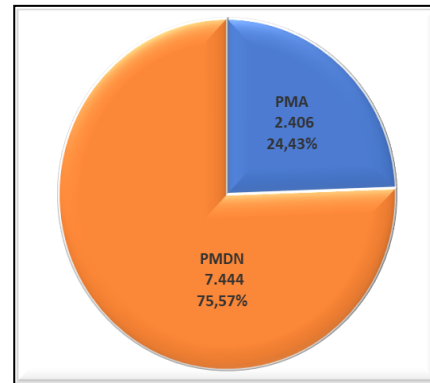


## Perbandingan Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan IV Tahun 2023

### a. Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2022



### b. Tenaga Kerja Triwulan IV Tahun 2023



Peringkat provinsi Kalimantan Timur pada level nasional, realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2023 menempati urutan ke-4, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-8, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara (Tabel 7)

**Tabel 7**

### Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2023

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Milliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$. Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	28.172,7	18.094	1	Jawa Barat	1.974,2	6.062
2	Jawa Timur	20.712,7	13.827	2	Sulawesi Tengah	1.803,9	265
3	DKI Jakarta	20.480,7	34.921	3	Jawa Timur	1.643,8	2.251
<b>4</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>16.019,1</b>	<b>3.254</b>	4	Maluku Utara	1.281,2	151
5	Nusa Tenggara Barat	10.813,4	1.141	5	DKI Jakarta	1.073,3	9.095
6	Riau	10.744,4	2.779	6	Banten	1.011,9	2.751
7	Banten	10.235,4	9.222	7	Kalimantan Utara	720,3	98
8	Jawa Tengah	8.841,9	10.538	<b>8</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>414,1</b>	<b>461</b>
9	Sumatera Selatan	6.930,3	3.116	9	Jawa Tengah	404,9	2.003
10	Kalimantan Selatan	5.436,3	1.943	10	Sumatera Selatan	254,4	279

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur



# Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember Tahun 2023

## 1. Realisasi Investasi PMDN

### 1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2023 mencapai **Rp 71,89 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 17.481; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 20,50 Triliun atau 39,30% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 9,44 Triliun atau 18,10% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 5,24 Triliun atau 10,05%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kabupaten Kutai Timur paling besar sebanyak 8.951 orang (24,21% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 1 orang (2,22% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kota Samarinda sebanyak 6.182 orang (16,72% dari total tenaga kerja Indonesia) dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5.993 orang (16,21% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 10 orang (22,22% dari total tenaga kerja asing). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember tahun 2023 sebanyak 37.022 orang.

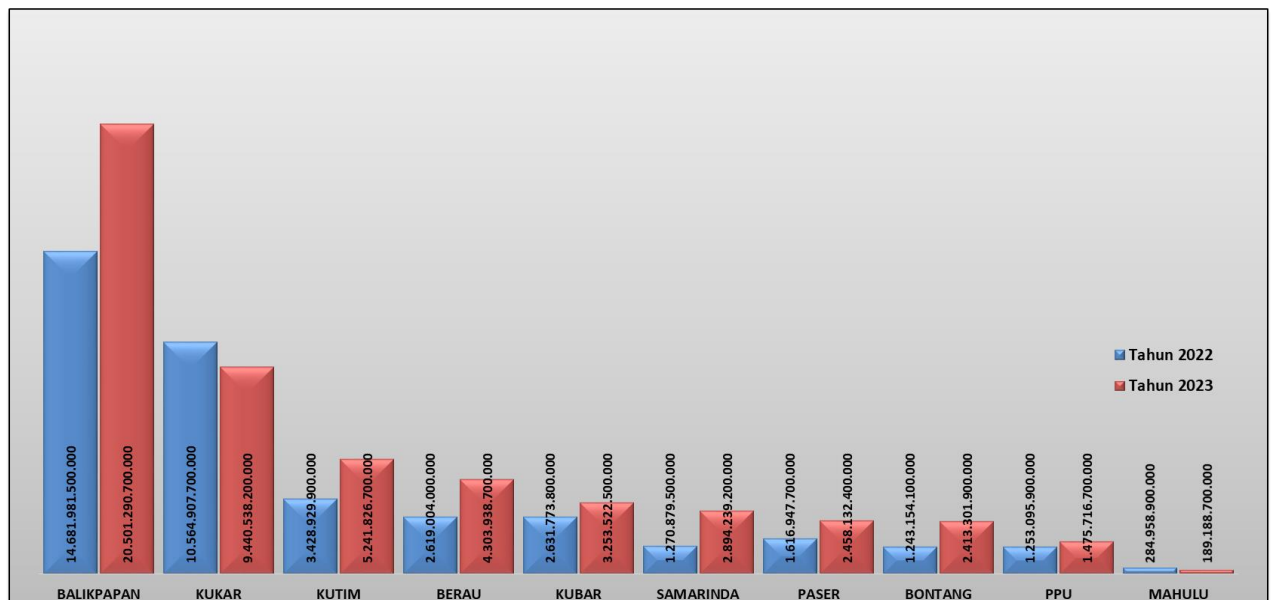
**Tabel 8**

**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2023**

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	4.812	20.501.290.700.000	5.435	5
2	Kutai Kartanegara	2.073	9.440.538.200.000	5.993	10
3	Kutai Timur	1.378	5.241.826.700.000	8.951	1
4	Berau	1.039	4.303.938.700.000	4.673	12
5	Kutai Barat	550	3.253.522.500.000	2.069	13
6	Samarinda	3.856	2.894.239.200.000	6.182	-
7	Paser	657	2.458.132.400.000	2.400	4
8	Bontang	773	2.413.301.900.000	560	-
9	Penajam Paser Utara	315	1.475.716.700.000	471	-
10	Mahakam Hulu	37	189.188.700.000	243	-
<b>TOTAL</b>		<b>15.490</b>	<b>52.171.695.700.000</b>	<b>36.977</b>	<b>45</b>

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Januari – Desember Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Lokasi**



## 1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2023 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 19,05 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 36,52%. Subsektor Pertambangan berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 16,49 Triliun atau 31,62%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 4,68 Triliun atau 8,98%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2023.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling besar yaitu 11.748 orang atau 31,77% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 27 orang atau 60,00% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu 11.629 orang atau 31,45% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 4,44% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Perdagangan dan Reparasi yaitu 2.818 orang atau 7,62% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 4,44% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.

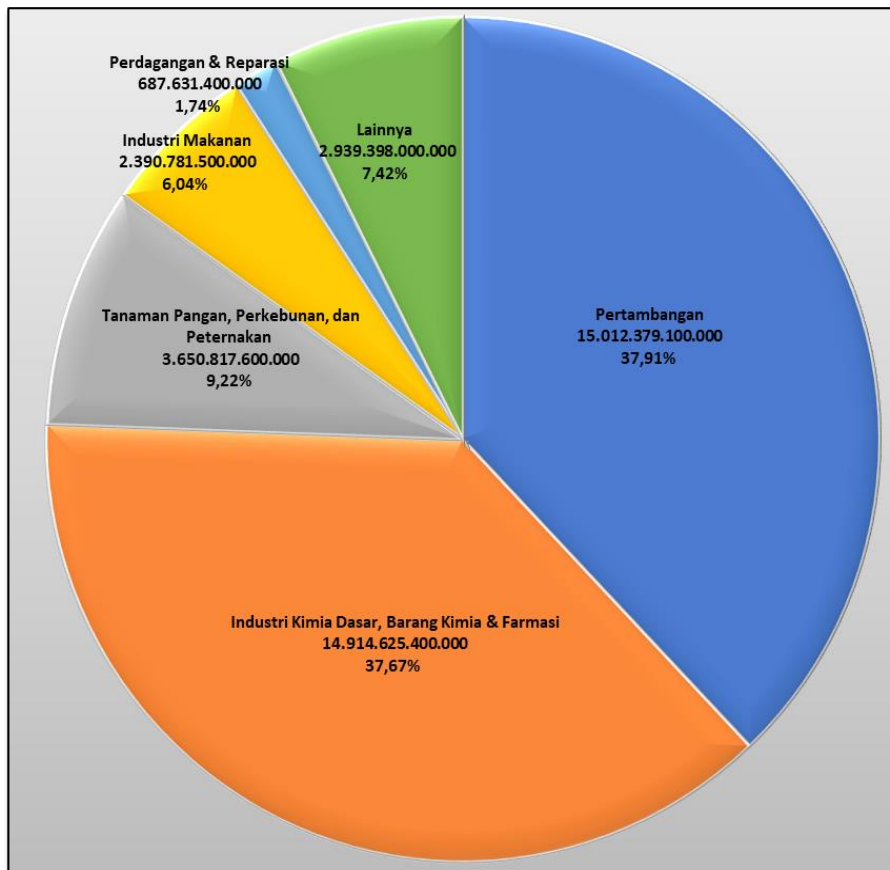
**Tabel 9**

**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2023**

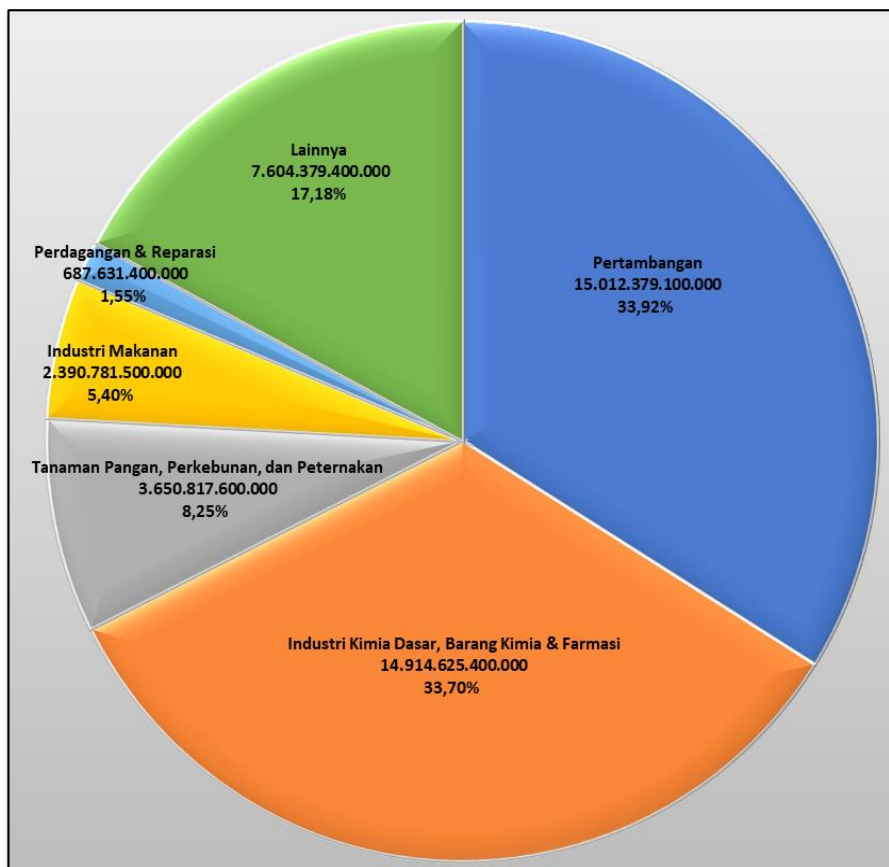
NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	701	4.686.630.200.000	11.629	2
2	Kehutanan	450	996.226.900.000	1.032	3
3	Perikanan	4	-	-	-
4	Pertambangan	1.337	16.497.941.300.000	11.748	27
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
1	Industri Makanan	387	2.545.477.200.000	1.160	2
2	Industri Tekstil	4	848.000.000	22	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	107	356.202.100.000	77	1
5	Industri Kertas & Percetakan	19	-	6	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	172	19.052.132.500.000	497	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	23	2.301.400.000	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	81	48.549.300.000	199	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	66	1.013.785.000.000	72	5
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	82	69.421.900.000	30	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	95	329.353.200.000	185	-
12	Industri Lainnya	160	14.923.000.000	118	-
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
1	Listrik, Gas dan Air	246	713.903.900.000	116	-
2	Konstruksi	2.682	460.326.100.000	1.409	3
3	Perdagangan & Reparasi	4.526	937.115.200.000	2.818	2
4	Hotel & Restoran	631	356.393.400.000	877	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	1.470	1.785.135.100.000	2.215	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	292	1.168.443.700.000	76	-
7	Jasa Lainnya	1.955	1.136.586.300.000	2.691	-
	<b>TOTAL</b>	<b>15.490</b>	<b>52.171.695.700.000</b>	<b>36.977</b>	<b>45</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur  
Periode Januari – Desember Tahun 2022**



**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur  
Periode Januari – Desember Tahun 2023**



## 2. Realisasi Investasi PMA

### 2.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2023 mencapai US\$ 1,266 Juta atau sebesar Rp 18,48 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 1.005 yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 630,92 Juta atau sebesar Rp 9,21 Triliun (49,83% dari total realisasi PMA), terdiri atas 143 proyek PMA. Kabupaten Kutai Barat menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 193,18 Juta atau sebesar Rp 2,84 Triliun (15,67% dari total realisasi PMA), atas 58 proyek PMA. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 180,41 Juta atau sebesar Rp 2,58 Triliun (14,25%), atas 138 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 8,61% hingga 0,03%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 5.976 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 37 orang, kemudian Kabupaten Kutai Timur dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 2.131 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 377 orang, disusul Kota Balikpapan dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.212 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 6 orang.

**Tabel 11**

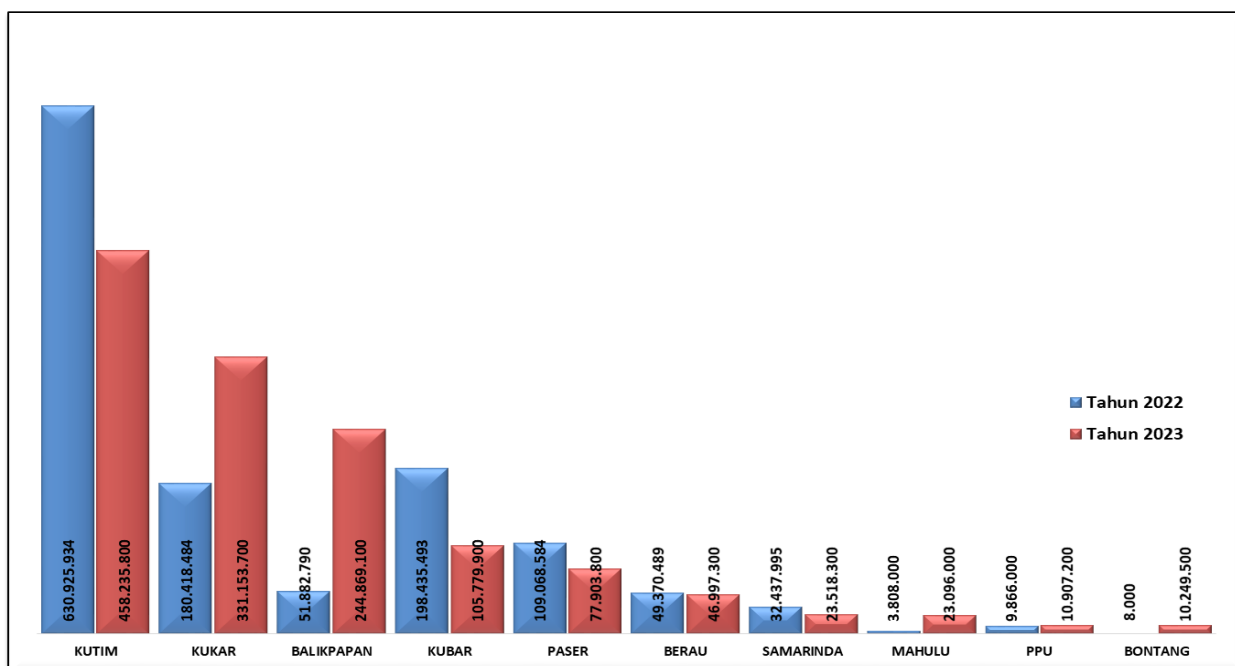
**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2023**

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Timur	221	458.235.800	2.131	377
2	Kutai Kartanegara	245	331.153.700	5.976	37
3	Balikpapan	802	244.869.100	1.212	6
4	Kutai Barat	113	105.779.900	1.142	8
5	Paser	71	77.903.800	497	1
6	Berau	127	46.997.300	1.082	-
7	Samarinda	265	23.518.300	906	5
8	Mahakam Hulu	74	23.096.000	353	-
9	Penajam Paser Utara	45	10.907.200	4	-
10	Bontang	28	10.249.500	27	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.991</b>	<b>1.332.710.600</b>	<b>13.330</b>	<b>434</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.800,-

**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Lokasi**



## 2.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 392,07 Juta (Rp 5,62 Triliun) atau sebesar 29,42% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu sebesar US\$ 195,03 Juta (Rp 2,79 Triliun) atau 14,63% dan subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan sebesar US\$. 172,59 Juta (Rp 2,47) atau 12,95%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 21 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2023.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 5.995 orang atau 44,97% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 7 orang atau 1,61% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Pertambangan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.829 orang atau 28,72% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 11 orang atau 2,53% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatan dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 952 orang atau mencapai 7,14% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 27 orang atau 6,22% tenaga kerja asing pada subsektor ini.

**Tabel 12**

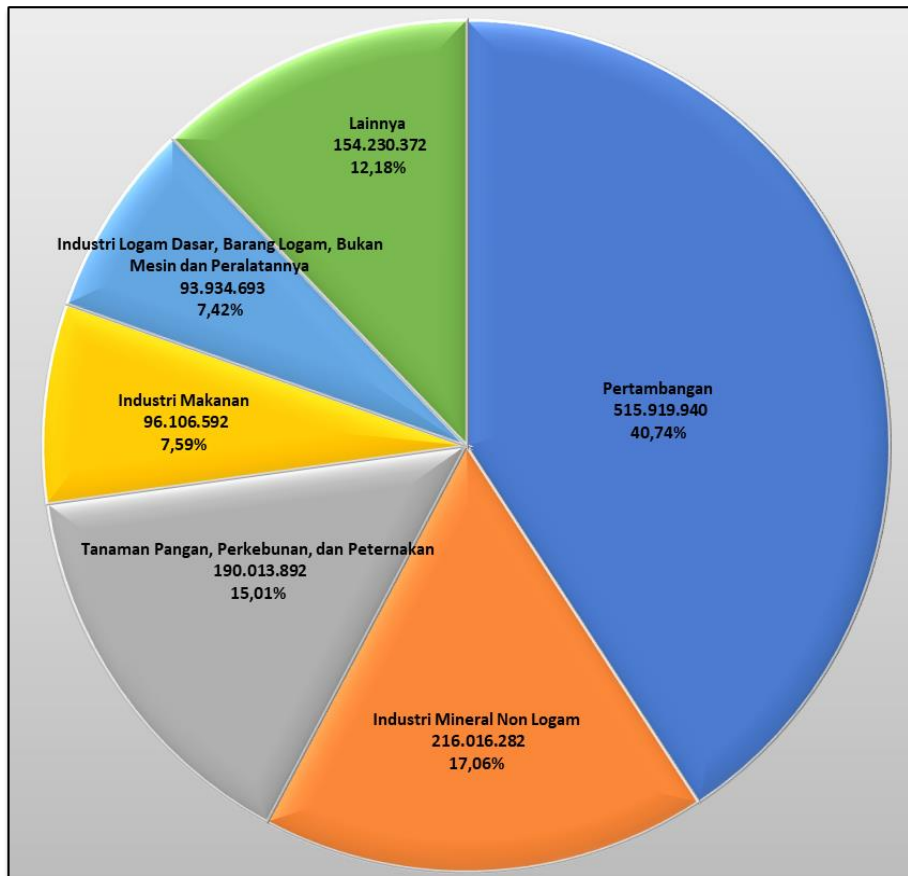
**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	230	195.033.000	5.995	7
2	Kehutanan	36	46.304.700	678	5
3	Perikanan	2	-	-	-
4	Pertambangan	293	392.072.600	3.829	11
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
1	Industri Makanan	205	119.900.400	319	5
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	16	7.703.400	28	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	1	13.500	27	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	38	59.777.400	16	-
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	9	128.200	11	-
8	Industri Mineral Non Logam	5	155.023.600	365	369
9	Industri Logam Dasar, brg. Logam, Bukan Mesin & Peralatan	64	172.595.100	952	27
10	Industri Mesin, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	40	1.455.400	101	1
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	16	54.300	6	-
12	Industri Lainnya	5	285.800	-	-
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
1	Listrik, Gas dan Air	11	2.274.400	7	3
2	Konstruksi	24	177.900	4	-
3	Perdagangan & Reparasi	432	15.375.800	232	1
4	Hotel & Restoran	177	7.105.400	366	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	178	140.322.000	113	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	36	5.266.000	27	-
7	Jasa Lainnya	173	11.841.700	254	5
<b>TOTAL</b>		<b>1.991</b>	<b>1.332.710.600</b>	<b>13.330</b>	<b>434</b>

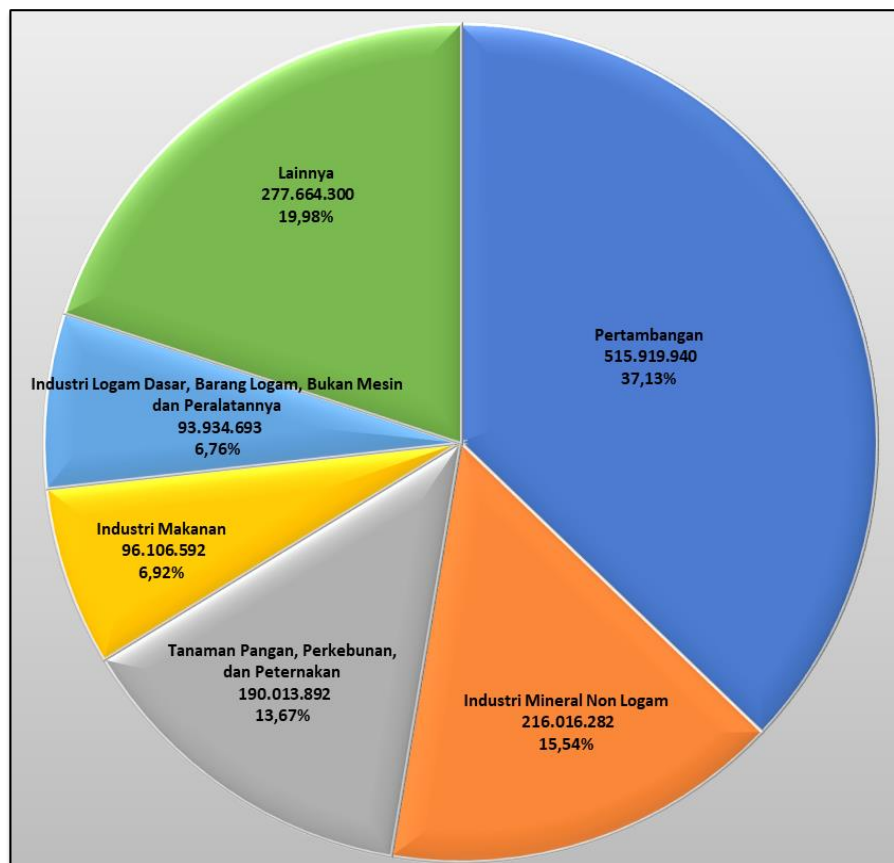
Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.800,-

**Grifik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2022 Berdasarkan Sektor Usaha**



**Grifik Perbandingan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember Tahun 2023 Berdasarkan Sektor Usaha**





### 2.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Asal Negara

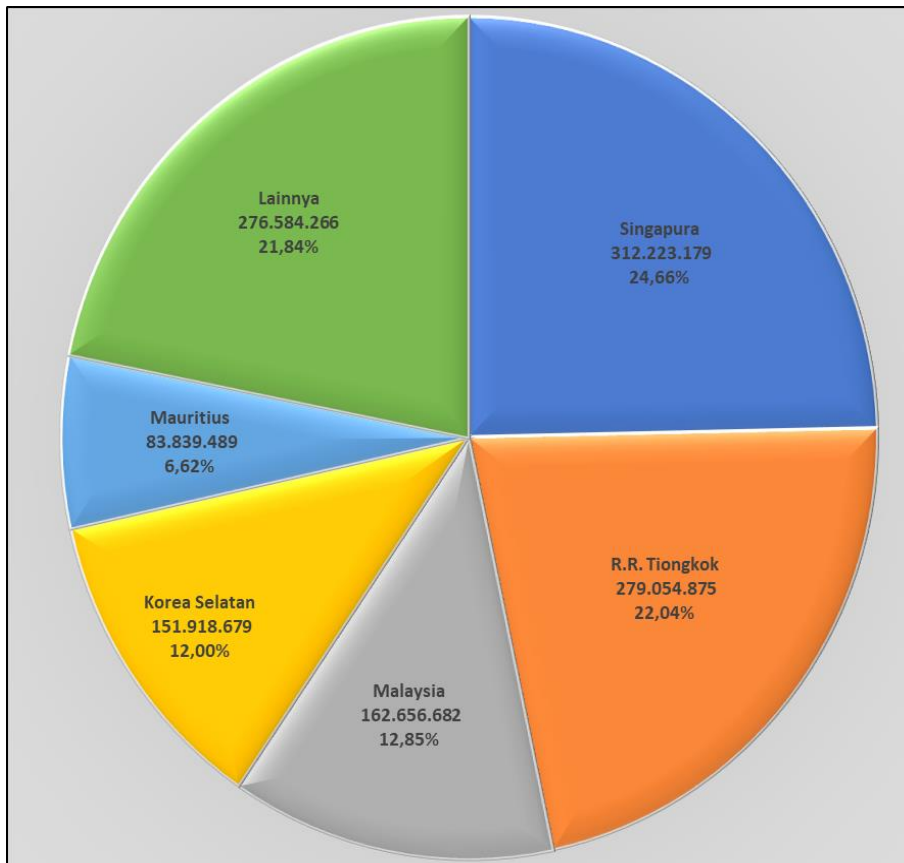
Pada tahun 2023 ini dilihat dari negara asal penanaman modal (asal negara investor) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah, menunjukkan bahwa 32 Negara yang terdaftar, menempatkan Negara Singapura, R.R. Tiongkok dan Malaysia sebagai 3 negara yang menanamkan modalnya relatif lebih besar. Investor asal Singapura merealisasikan investasi sebesar US\$ 328,23 Juta (Rp 4,85 Triliun) atau 24,63% dari total nilai investasi pada 703 proyek. Investor R.R. Tiongkok merealisasikan investasi sebesar US\$ 324,58 Juta (Rp 4,80 Triliun) atau 24,36% dari total nilai investasi pada 55 proyek, sedangkan investor dari Malaysia merealisasikan investasi sebesar US\$ 146,04 Juta (Rp 2,16 Triliun) atau 10,96% dari total nilai investasi pada 295 proyek.

**Tabel 13**

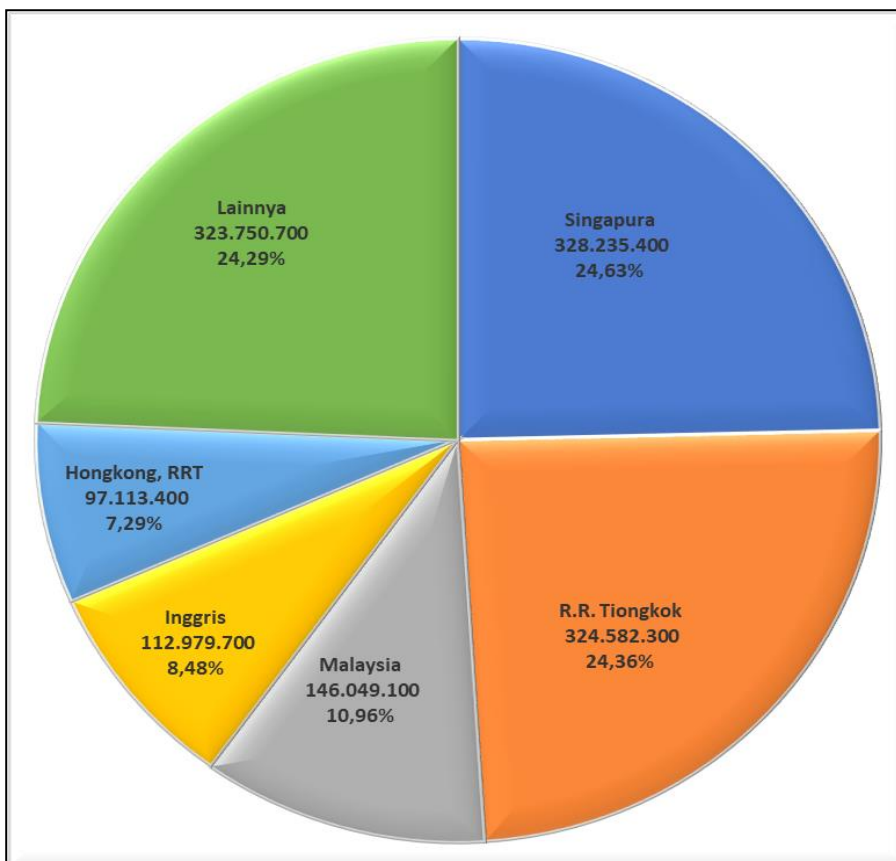
**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember 2023**

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	Singapura	703	328.235.400	4.857.883.920.000	24,63%
2	R.R. Tiongkok	55	324.582.300	4.803.818.040.000	24,36%
3	Malaysia	295	146.049.100	2.161.526.680.000	10,96%
4	Inggris	57	112.979.700	1.672.099.560.000	8,48%
5	Hongkong, RRT	79	97.113.400	1.437.278.320.000	7,29%
6	Korea Selatan	55	83.805.600	1.240.322.880.000	6,29%
7	Mauritius	9	73.162.700	1.082.807.960.000	5,49%
8	Kepulauan Virgin Inggris	93	53.171.600	786.939.680.000	3,99%
9	Australia	159	39.778.000	588.714.400.000	2,98%
10	Thailand	53	21.259.400	314.639.120.000	1,60%
11	India	28	10.505.200	155.476.960.000	0,79%
12	Perancis	14	8.808.000	130.358.400.000	0,66%
13	Bermuda	1	7.727.300	114.364.040.000	0,58%
14	Jepang	140	7.563.000	111.932.400.000	0,57%
15	Seychelles	12	7.214.800	106.779.040.000	0,54%
16	Amerika Serikat	32	6.647.100	98.377.080.000	0,50%
17	Uni Emirat Arab	19	1.316.400	19.482.720.000	0,10%
18	Swiss	23	711.600	10.531.680.000	0,05%
19	Kepulauan Cayman	16	643.900	9.529.720.000	0,05%
20	Belanda	29	621.800	9.202.640.000	0,05%
21	Swedia	29	595.200	8.808.960.000	0,04%
22	Spanyol	3	54.100	800.680.000	0,00%
23	Bangladesh	4	50.100	741.480.000	0,00%
24	Kanada	33	49.200	728.160.000	0,00%
25	Jerman	3	35.200	520.960.000	0,00%
26	Qatar	4	24.600	364.080.000	0,00%
27	Denmark	5	3.700	54.760.000	0,00%
28	Luxembourg	4	2.200	32.560.000	0,00%
29	Eswatini	2	-	-	0,00%
30	Gibraltar	28	-	-	0,00%
31	Rusia	2	-	-	0,00%
32	Swaziland	2	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.991</b>	<b>1.332.710.600</b>	<b>19.724.116.880.000</b>	<b>100%</b>

**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember Tahun 2022 Berdasarkan Asal Negara**



**Grafik Perbandingan Realisasi Investasi di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember Tahun 2023 Berdasarkan Asal Negara**





### 3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari–Desember 2023 Tahun 2023

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatifkan pada Tahun 2023 (Januari-Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 71,89 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 52,17 Triliun atau 72,57% dari total realisasi investasi, dengan 15.490 proyek dan PMA sebesar Rp 19,72 Triliun atau 27,43% dari total realisasi investasi, dengan 1.991 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2023 telah mencapai angka 111,47%, dengan total proyek sebanyak 17.490 proyek. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 37.022 orang atau 72,90% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 36.977 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 45 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 13.764 orang atau 27,43% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 13.330 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 434 orang.

**Tabel 14**

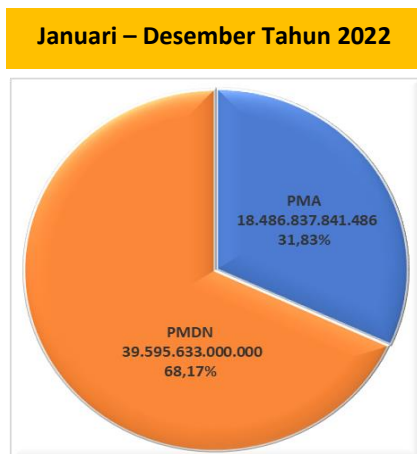
**Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari–Desember 2023**

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan I – Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	52.171.695.000.000	15.490	37.022
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	1.332.710.600		
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	19.724.116.880.000	1.991	13.764
<b>TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2</b>		<b>71.895.812.580.000</b>	<b>17.481</b>	<b>50.786</b>

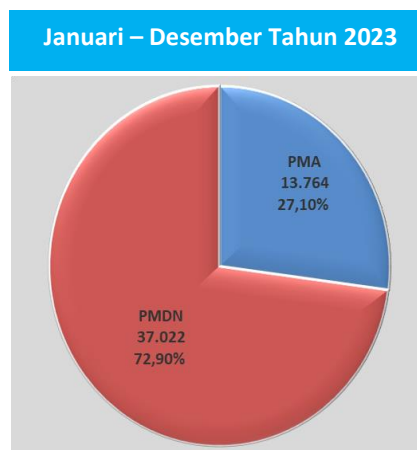
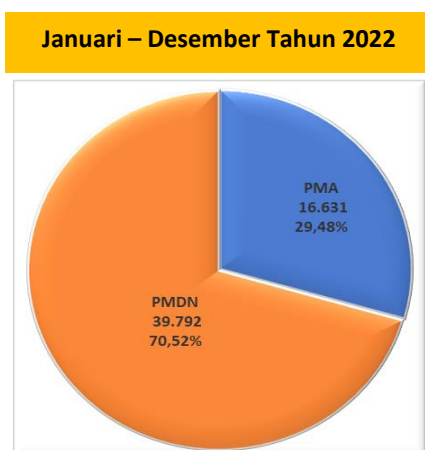
Keterangan : \*) Dikonversikan pada kurs Rp 14.800,-/US\$

Sumber: Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

#### Grafik Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023



#### Grafik Perbandingan Tenaga Kerja PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023



## a. Peringkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Level Nasional

### 1. Triwulan IV Tahun 2023

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun ini menempati urutan ke-4, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-8, setelah Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

**Tabel 15**

**Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2023**

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Milliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$. Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	28.172,7	18.094	1	Jawa Barat	1.974,2	6.062
2	Jawa Timur	20.712,7	13.827	2	Sulawesi Tengah	1.803,9	265
3	DKI Jakarta	20.480,7	34.921	3	Jawa Timur	1.643,8	2.251
<b>4</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>16.019,1</b>	<b>3.254</b>	4	Maluku Utara	1.281,2	151
5	Nusa Tenggara Barat	10.813,4	1.141	5	DKI Jakarta	1.073,3	9.095
6	Riau	10.744,4	2.779	6	Banten	1.011,9	2.751
7	Banten	10.235,4	9.222	7	Kalimantan Utara	720,3	98
8	Jawa Tengah	8.841,9	10.538	<b>8</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>414,1</b>	<b>461</b>
9	Sumatera Selatan	6.930,3	3.116	9	Jawa Tengah	404,9	2.003
10	Kalimantan Selatan	5.436,3	1.943	10	Sumatera Selatan	254,4	279

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM, 2023

### 2. Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023

Di level nasional realisasi investasi PMDN pada bulan Januari – Desember 2023 menempati urutan ke-4, setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan untuk PMA berada di urutan ke-10, setelah Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.

**Tabel 16**

**Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2023**

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Milliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$. Juta)	PROYEK
1	DKI Jakarta	92.202,1	68.704	1	Jawa Barat	8.283,7	10.512
2	Jawa Barat	88.012,9	65.758	2	Sulawesi Tengah	7.244,1	397
3	Jawa Timur	74.937,4	28.484	3	Maluku Utara	4.988,2	224
<b>4</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>52.171,7</b>	<b>7.571</b>	4	DKI Jakarta	4.830,0	20.028
5	Riau	48.243,3	5.548	5	Jawa Timur	4.741,0	3.913
6	Banten	37.971,7	16.488	6	Banten	4.451,6	4.775
7	Jawa Tengah	32.987,2	17.460	7	Riau	2.042,3	600
8	Nusa Tenggara Barat	30.766,2	2.543	8	Jawa Tengah	1.563,7	3.021
9	Sumatera Selatan	25.602,4	5.667	9	Sumatera Selatan	1.478,6	456
10	Sumatera Utara	21.574,0	8.253	<b>10</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>1.332,7</b>	<b>822</b>

Sumber : Kementerian Investasi/BKPM, 2023

#### Catatan :

- ❖ Nilai Investasi Triwulan IV 2023 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Oktober - Desember 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan PMA dan PMDN yang diinput secara daring (online).
- ❖ Nilai Investasi Tahun 2023 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 12 bulan periode laporan (Januari - Desember 2023) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan PMA dan PMDN yang diinput secara daring (online).
- ❖ Nilai investasi yang dihitung berdasarkan LKPM Online dari perusahaan PMA dan PMDN, *di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.*
- ❖ Kurs Tahun 2022, US\$ 1 = Rp 14.800 sesuai dengan APBN 2023.

# LAMPIRAN PRESS RELEASE

**Tabel 1****Realisasi Investasi PMA Non Migas dan Non Batubara di Kalimantan Timur Periode Januari – Maret 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Mineral Non Logam	1	785.289.480.000	27	62
2	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	19	707.360.080.000	48	5
3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	52	578.452.080.000	742	-
4	Kehutanan	7	471.084.000.000	296	4
5	Industri Makanan	45	316.614.920.000	108	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	10	125.031.880.000	2	-
7	Industri Kayu	2	103.212.240.000	10	-
8	Transportasi, Gudang & Komunikasi	35	43.575.640.000	11	-
9	Perdagangan & Reparasi	112	35.160.360.000	48	-
10	Hotel & Restoran	33	28.624.680.000	67	-
11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	11	6.750.280.000	18	-
12	Jasa Lainnya	39	6.288.520.000	20	-
13	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	12	4.050.760.000	7	-
14	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	303.400.000	-	-
15	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	38.480.000	4	-
16	Konstruksi	6	20.720.000	1	-
17	Industri Lainnya	1	-	-	-
18	Listrik, Gas dan Air	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>	<b>3.211.857.520.000</b>	<b>1.409</b>	<b>71</b>

**Tabel 2****Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Januari – Maret 2023**

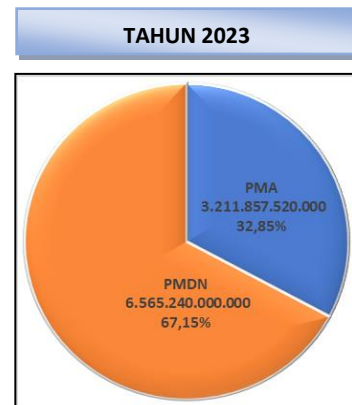
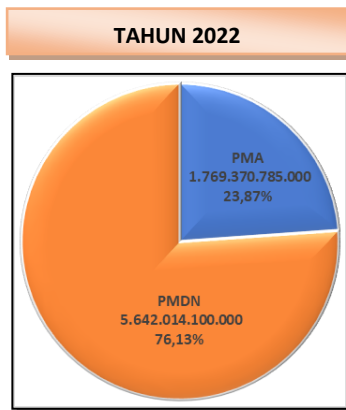
NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	44	2.989.885.000.000	186	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	175	683.720.700.000	2.756	1
3	Industri Makanan	96	618.970.100.000	81	-
4	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	70	496.887.800.000	5	-
5	Jasa Lainnya	426	440.317.500.000	400	-
6	Transportasi, Gudang & Komunikasi	327	375.944.500.000	423	-
7	Kehutanan	74	330.539.100.000	719	-
8	Perdagangan & Reparasi	1.048	277.738.800.000	765	-
9	Konstruksi	689	186.058.600.000	419	3
10	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	12	90.448.200.000	17	-
11	Industri Mineral Non Logam	12	26.785.700.000	51	-
12	Hotel & Restoran	155	19.625.300.000	94	-
13	Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	20	9.685.600.000	8	-
14	Industri Kayu	34	9.274.500.000	51	1
15	Listrik, Gas dan Air	36	6.829.100.000	3	-
16	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	4	2.106.500.000	-	-
17	Industri Lainnya	33	423.000.000	21	-
18	Perikanan	1	-	-	-
19	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	8	-	-	-
20	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	13	-	4	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.277</b>	<b>6.565.240.000.000</b>	<b>6.003</b>	<b>5</b>

**Tabel 3**

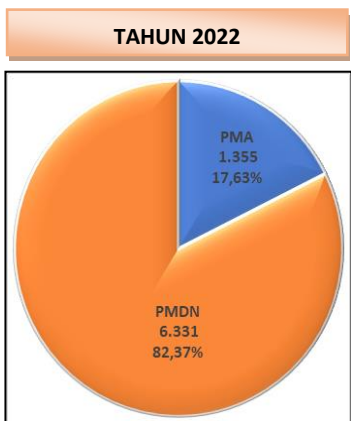
**Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Januari – Maret 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	54	3.114.916.880.000	188	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	227	1.262.172.780.000	3.498	1
3	Industri Makanan	141	935.585.020.000	189	-
4	Industri Mineral Non Logam	13	812.075.180.000	78	62
5	Kehutanan	81	801.623.100.000	1.015	4
6	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	31	797.808.280.000	65	5
7	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	82	500.938.560.000	12	-
8	Jasa Lainnya	465	446.606.020.000	420	-
9	Transportasi, Gudang & Komunikasi	362	419.520.140.000	434	-
10	Perdagangan & Reparasi	1.160	312.899.160.000	813	-
11	Konstruksi	695	186.079.320.000	420	3
12	Industri Kayu	36	112.486.740.000	61	1
13	Hotel & Restoran	188	48.249.980.000	161	-
14	Industri Alat Angkutan & Alat Transportasi Lain	20	9.685.600.000	8	-
15	Listrik, Gas dan Air	39	6.829.100.000	3	-
16	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	24	6.750.280.000	22	-
17	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	6	2.144.980.000	4	-
18	Industri Lainnya	34	423.000.000	21	-
19	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	303.400.000	-	-
20	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	8	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.670</b>	<b>9.777.097.520.000</b>	<b>7.412</b>	<b>76</b>

**Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara Januari - Maret Tahun 2022 dan Januari - Maret I Tahun 2023**



**Perbandingan Serapan Tenaga Kerja PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara Januari - Maret Tahun 2022 dan Januari - Maret Tahun 2023**



**Tabel 4****Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara Untuk Non Migas dan Non Batubara Januari–Maret 2023**

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	R.R. Tiongkok	13	97.240.400	1.439.157.920.000	44,81%
2	Malaysia	75	54.162.800	801.609.440.000	24,96%
3	Inggris	12	24.750.900	366.313.320.000	11,41%
4	Singapura	129	18.296.400	270.786.720.000	8,43%
5	Kepulauan Virgin Inggris	12	6.355.400	94.059.920.000	2,93%
6	Korea Selatan	5	5.987.500	88.615.000.000	2,76%
7	Amerika Serikat	6	4.438.200	65.685.360.000	2,05%
8	Thailand	10	3.596.300	53.225.240.000	1,66%
9	Hongkong, RRT	14	988.100	14.623.880.000	0,46%
10	Jepang	31	649.600	9.614.080.000	0,30%
11	Australia	35	259.000	3.833.200.000	0,12%
12	India	3	201.900	2.988.120.000	0,09%
13	Jerman	1	35.200	520.960.000	0,02%
14	Seychelles	2	23.000	340.400.000	0,01%
15	Qatar	1	20.500	303.400.000	0,01%
16	Kepulauan Cayman	4	4.400	65.120.000	0,00%
17	Kanada	11	3.400	50.320.000	0,00%
18	Uni Emirat Arab	3	2.800	41.440.000	0,00%
19	Belanda	5	1.400	20.720.000	0,00%
20	Swiss	4	200	2.960.000	0,00%
21	Denmark	1	-	-	0,00%
22	Eswatini	1	-	-	0,00%
23	Gibraltar	6	-	-	0,00%
24	Luxembourg	1	-	-	0,00%
25	Mauritius	1	-	-	0,00%
26	Swedia	7	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>	<b>217.017.400</b>	<b>3.211.857.520.000</b>	<b>100%</b>

Tabel 5

## Realisasi Investasi PMA Non Migas dan Non Batubara di Kalimantan Timur Periode April - Juni 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11	861.172.040.000	72	1
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	60	544.040.600.000	1.387	1
3	Industri Mineral Non Logam	2	512.211.720.000	174	17
4	Industri Makanan	43	295.868.280.000	78	-
5	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	38	172.038.160.000	62	-
6	Perdagangan dan Reparasi	97	124.673.720.000	32	-
7	Industri Kimia Dan Farmasi	8	107.656.680.000	2	-
8	Hotel dan Restoran	54	62.084.520.000	114	-
9	Jasa Lainnya	46	45.582.520.000	116	2
10	Kehutanan	10	44.907.640.000	135	1
11	Listrik, Gas dan Air	2	33.661.120.000	2	1
12	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	10	6.218.960.000	19	-
13	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9	4.860.320.000	6	-
14	Industri Lainnya	2	4.229.840.000	-	-
15	Konstruksi	7	2.206.680.000	-	-
16	Industri Karet dan Plastik	3	1.777.480.000	2	-
17	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	4	430.680.000	-	-
18	Industri Kayu	2	384.800.000	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>408</b>	<b>2.824.005.760.000</b>	<b>2.201</b>	<b>23</b>

Tabel 6

## Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode April - Juni 2023

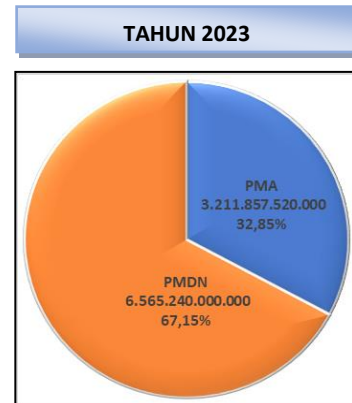
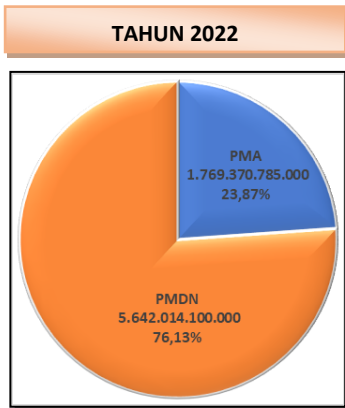
NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dan Farmasi	39	3.920.405.700.000	33	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	166	956.859.000.000	2.822	-
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	339	453.242.500.000	786	-
4	Kehutanan	103	306.345.300.000	139	3
5	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	14	246.381.600.000	14	2
6	Perdagangan dan Reparasi	1.163	241.822.700.000	1.164	-
7	Industri Makanan	83	223.117.100.000	599	-
8	Industri Kayu	28	183.995.700.000	24	-
9	Jasa Lainnya	422	173.454.100.000	603	-
10	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	59	171.642.100.000	29	-
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	23	128.172.900.000	38	-
12	Konstruksi	660	92.835.600.000	678	-
13	Listrik, Gas dan Air	57	60.567.300.000	6	-
14	Hotel dan Restoran	150	31.897.600.000	222	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	20	9.018.800.000	6	-
16	Industri Mineral Non Logam	18	5.905.500.000	83	-
17	Industri Lainnya	30	2.173.100.000	2	-
18	Industri Tekstil	2	605.000.000	22	-
19	Industri Karet dan Plastik	5	-	-	-
20	Industri Kertas dan Percetakan	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.384</b>	<b>7.208.441.600.000</b>	<b>7.270</b>	<b>5</b>

**Tabel 7**

**Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode April - Juni 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dan Farmasi	136	4.045.079.420.000	65	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	170	957.289.680.000	2.822	-
3	Hotel dan Restoran	161	893.069.640.000	294	1
4	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	80	553.059.400.000	1.393	1
5	Industri Karet dan Plastik	7	512.211.720.000	174	17
6	Industri Kayu	71	479.863.980.000	102	-
7	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	341	453.627.300.000	786	-
8	Kehutanan	113	312.564.260.000	158	3
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	68	308.466.120.000	128	2
10	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	61	300.211.060.000	100	-
11	Industri Makanan	129	268.699.620.000	715	2
12	Perdagangan dan Reparasi	1.170	244.029.380.000	1.164	-
13	Jasa Lainnya	424	207.115.220.000	605	1
14	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	62	173.419.580.000	31	-
15	Industri Lainnya	38	109.829.780.000	4	-
16	Konstruksi	669	97.695.920.000	684	-
17	Listrik, Gas dan Air	59	64.797.140.000	6	-
18	Industri Mineral Non Logam	28	50.813.140.000	218	1
19	Industri Tekstil	2	605.000.000	22	-
20	Industri Kertas dan Percetakan	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.792</b>	<b>10.032.447.360.000</b>	<b>9.471</b>	<b>28</b>

**Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara April - Juni Tahun 2022 dan April - Juni Tahun 2023**



**Perbandingan Serapan Tenaga Kerja PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara April - Juni Tahun 2022 dan April - Juni Tahun 2023**





**Tabel 8****Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara Untuk Non Migas dan Non Batubara April - Juni 2023**

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	R.R. Tiongkok	6	92.996.100	1.376.342.280.000	48,74%
2	Malaysia	71	26.994.500	399.518.600.000	14,15%
3	Singapura	137	19.513.600	288.801.280.000	10,23%
4	Kepulauan Virgin Inggris	13	17.394.900	257.444.520.000	9,12%
5	Perancis	5	7.811.800	115.614.640.000	4,09%
6	Inggris	13	7.393.800	109.428.240.000	3,87%
7	Jepang	38	5.917.500	87.579.000.000	3,10%
8	Thailand	11	4.692.400	69.447.520.000	2,46%
9	Hongkong, RRT	21	3.145.100	46.547.480.000	1,65%
10	Amerika Serikat	17	2.184.900	32.336.520.000	1,15%
11	India	3	1.576.900	23.338.120.000	0,83%
12	Swedia	7	485.400	7.183.920.000	0,25%
13	Kepulauan Cayman	5	283.000	4.188.400.000	0,15%
14	Australia	25	169.300	2.505.640.000	0,09%
15	Belanda	4	128.200	1.897.360.000	0,07%
16	Swiss	6	46.800	692.640.000	0,02%
17	Seychelles	2	35.700	528.360.000	0,02%
18	Korea Selatan	7	29.100	430.680.000	0,02%
19	Qatar	1	4.100	60.680.000	0,00%
20	Uni Emirat Arab	3	2.800	41.440.000	0,00%
21	Luxembourg	1	2.200	32.560.000	0,00%
22	Kanada	1	1.700	25.160.000	0,00%
23	Bangladesh	1	1.400	20.720.000	0,00%
24	Denmark	1	-	-	0,00%
25	Eswatini	1	-	-	0,00%
26	Gibraltar	6	-	-	0,00%
27	Jerman	1	-	-	0,00%
28	Mauritius	1	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>408</b>	<b>190.811.200</b>	<b>2.824.005.760.000</b>	<b>100%</b>

Tabel 9

## Realisasi Investasi PMA Non Migas dan Non Batubara di Kalimantan Timur Periode Juli - September 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	61	852.561.400.000	2.763	2
2	Industri Makanan	53	691.895.560.000	92	1
3	Industri Mineral Non Logam	1	475.895.480.000	50	23
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	15	469.904.440.000	609	5
5	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	13	404.771.120.000	12	-
6	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	68	145.646.800.000	26	-
7	Kehutanan	12	59.940.000.000	113	-
8	Perdagangan & Reparasi	142	56.149.720.000	144	1
9	Jasa Lainnya	52	44.805.520.000	72	1
10	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	10	22.390.920.000	8	-
11	Industri Kayu	11	10.413.280.000	18	-
12	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	11	8.570.680.000	64	1
13	Hotel & Restoran	47	2.144.520.000	46	-
14	Industri Kertas & Pencetakan	1	199.800.000	27	-
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	6	69.560.000	6	-
16	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	32.560.000	2	-
17	Perikanan	1	-	-	-
18	Industri Lainnya	1	-	-	-
19	Listrik, Gas dan Air	4	-	5	2
20	Konstruksi	6	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>517</b>	<b>3.245.391.360.000</b>	<b>4.057</b>	<b>36</b>

Tabel 10

## Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Juli - September 2023

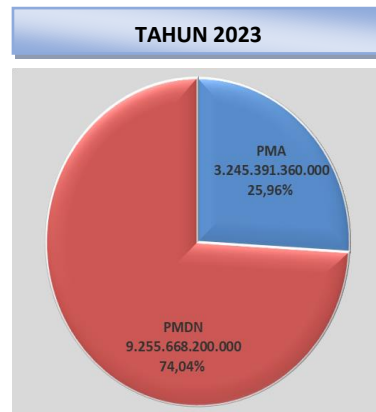
NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	51	4.594.650.800.000	53	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	187	1.666.247.800.000	3.459	1
3	Transportasi, Gudang & Komunikasi	445	527.231.400.000	411	-
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	29	508.028.800.000	20	-
5	Industri Makanan	104	370.258.100.000	106	2
6	Perdagangan & Reparasi	1.588	271.433.500.000	708	2
7	Listrik, Gas dan Air	91	263.294.600.000	98	-
8	Jasa Lainnya	652	253.783.100.000	1.180	-
9	Kehutanan	143	234.227.300.000	97	-
10	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	87	163.257.500.000	5	-
11	Hotel & Restoran	171	138.944.300.000	498	-
12	Konstruksi	878	118.581.400.000	152	-
13	Industri Kayu	30	76.513.000.000	-	-
14	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	26	30.016.500.000	-	-
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	27	17.923.300.000	21	-
16	Industri Lainnya	59	10.612.800.000	53	-
17	Industri Mineral Non Logam	26	10.226.100.000	59	-
18	Industri Tekstil	2	243.000.000	-	-
19	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	7	194.900.000	-	-
20	Perikanan	1	-	-	-
21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	3	-	4	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.607</b>	<b>9.255.668.200.000</b>	<b>6.924</b>	<b>5</b>

**Tabel 11**

**Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Juli - September 2023**

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	64	4.999.421.920.000	65	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	248	2.518.809.200.000	6.222	3
3	Industri Makanan	157	1.062.153.660.000	198	3
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	44	977.933.240.000	629	5
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	513	672.878.200.000	437	-
6	Industri Mineral Non Logam	27	486.121.580.000	109	23
7	Perdagangan & Reparasi	1.730	327.583.220.000	852	3
8	Jasa Lainnya	704	298.588.620.000	1.252	1
9	Kehutanan	155	294.167.300.000	210	-
10	Listrik, Gas dan Air	95	263.294.600.000	103	2
11	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	97	185.648.420.000	13	-
12	Hotel & Restoran	218	141.088.820.000	544	-
13	Konstruksi	884	118.581.400.000	152	-
14	Industri Kayu	41	86.926.280.000	18	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	37	38.587.180.000	64	1
16	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	33	17.992.860.000	27	-
17	Industri Lainnya	60	10.612.800.000	53	-
18	Industri Tekstil	2	243.000.000	-	-
19	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik	9	227.460.000	2	-
20	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	4	199.800.000	31	-
21	Perikanan	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.124</b>	<b>12.501.059.560.000</b>	<b>10.981</b>	<b>41</b>

**Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara Juli - September Tahun 2022 dan Juli - September Tahun 2023**



**Perbandingan Serapan Tenaga Kerja PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara Juli - September Tahun 2022 dan Juli - September Tahun 2023**



**Tabel 12****Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara Untuk Non Migas dan Non Batubara Juli - September 2023**

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	Singapura	186	79.541.300	1.177.211.240.000	36,27%
2	R.R. Tiongkok	17	64.547.400	955.301.520.000	29,44%
3	Malaysia	74	35.037.900	518.560.920.000	15,98%
4	Inggris	15	13.055.800	193.225.840.000	5,95%
5	Kepulauan Virgin Inggris	23	12.810.800	189.599.840.000	5,84%
6	Bermuda	1	7.727.300	114.364.040.000	3,52%
7	Thailand	15	1.891.400	27.992.720.000	0,86%
8	Hongkong, RRT	21	1.396.400	20.666.720.000	0,64%
9	Perancis	7	993.400	14.702.320.000	0,45%
10	Jepang	39	838.300	12.406.840.000	0,38%
11	Belanda	10	375.600	5.558.880.000	0,17%
12	Kepulauan Cayman	7	356.500	5.276.200.000	0,16%
13	Australia	33	205.100	3.035.480.000	0,09%
14	Swiss	3	142.500	2.109.000.000	0,06%
15	Swedia	9	109.800	1.625.040.000	0,05%
16	Seychelles	2	105.700	1.564.360.000	0,05%
17	Spanyol	2	54.100	800.680.000	0,02%
18	Korea Selatan	9	40.400	597.920.000	0,02%
19	Amerika Serikat	5	24.000	355.200.000	0,01%
20	Kanada	10	13.500	199.800.000	0,01%
21	India	10	12.300	182.040.000	0,01%
22	Denmark	2	3.700	54.760.000	0,00%
23	Bangladesh	1	-	-	0,00%
24	Gibraltar	6	-	-	0,00%
25	Jerman	1	-	-	0,00%
26	Luxembourg	1	-	-	0,00%
27	Mauritius	1	-	-	0,00%
28	Qatar	1	-	-	0,00%
29	Rusia	2	-	-	0,00%
30	Swaziland	1	-	-	0,00%
31	Uni Emirat Arab	3	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>517</b>	<b>219.283.200</b>	<b>3.245.391.360.000</b>	<b>100%</b>

Tabel 13

## Realisasi Investasi PMA Non Migas dan Non Batubara di Kalimantan Timur Periode Oktober - Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	37	1.715.505.000.000	14	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	57	911.434.320.000	1.103	4
3	Industri Mineral Non Logam	1	520.952.600.000	114	267
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	19	515.970.920.000	223	16
5	Industri Makanan	64	470.147.160.000	41	4
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	7	247.245.840.000	-	-
7	Kehutanan	7	109.377.920.000	134	-
8	Jasa Lainnya	36	78.580.600.000	46	2
9	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	5	46.634.800.000	6	-
10	Hotel & Restoran	43	12.306.200.000	139	-
11	Perdagangan & Reparasi	81	11.578.040.000	8	-
12	Konstruksi	5	405.520.000	3	-
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	48.840.000	3	-
14	Perikanan	1	-	-	-
15	Listrik, Gas dan Air	2	-	-	-
16	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	8	-	-	-
17	Industri Lainnya	1	-	-	-
18	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>4.640.187.760.000</b>	<b>1.834</b>	<b>293</b>

Tabel 14

## Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Oktober - Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	38	7.547.191.000.000	225	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	173	1.379.802.700.000	2.592	-
3	Industri Makanan	104	1.333.131.900.000	374	-
4	Transportasi, Gudang & Komunikasi	359	428.716.700.000	595	-
5	Listrik, Gas dan Air	62	383.212.900.000	9	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	76	336.656.300.000	37	-
7	Jasa Lainnya	455	269.031.600.000	508	-
8	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	25	173.571.400.000	118	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11	168.926.400.000	21	3
10	Hotel & Restoran	155	165.926.200.000	63	-
11	Perdagangan & Reparasi	727	146.120.200.000	181	-
12	Kehutanan	130	125.115.200.000	77	-
13	Industri Kayu	15	86.418.900.000	2	-
14	Konstruksi	455	62.850.500.000	160	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	23	30.386.600.000	20	-
16	Industri Mineral Non Logam	25	5.632.000.000	6	-
17	Industri Lainnya	38	1.714.100.000	42	-
18	Industri Karet & Plastik	7	-	-	-
19	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	5	-	2	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.885</b>	<b>12.644.404.600.000</b>	<b>5.032</b>	<b>3</b>

Tabel 15

## Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Oktober - Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	43	7.547.596.520.000	228	-
2	Hotel & Restoran	192	1.881.431.200.000	77	-
3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	173	1.379.802.700.000	2.592	-

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
4	Industri Makanan	104	1.333.131.900.000	374	-
5	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	57	911.434.320.000	1.103	4
6	Jasa Lainnya	474	785.002.520.000	731	16
7	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	24	551.339.200.000	134	267
8	Industri Tekstil	64	470.147.160.000	41	4
9	Transportasi, Gudang & Komunikasi	402	441.022.900.000	734	-
10	Listrik, Gas dan Air	62	383.212.900.000	9	-
11	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	78	336.705.140.000	40	-
12	Konstruksi	462	310.096.340.000	160	-
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	47	247.507.000.000	67	5
14	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	106	185.149.440.000	126	-
15	Perdagangan & Reparasi	730	146.120.200.000	181	-
16	Kehutanan	131	125.115.200.000	77	-
17	Industri Lainnya	45	111.092.020.000	176	-
18	Industri Kayu	16	86.418.900.000	2	-
19	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	12	46.634.800.000	6	-
20	Industri Mineral Non Logam	33	5.632.000.000	6	-
21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	7	-	2	-
22	Perikanan	3	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.265</b>	<b>17.284.592.360.000</b>	<b>6.866</b>	<b>296</b>

**Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara  
Oktober - Desember Tahun 2022 dan Oktober - Desember Tahun 2023**



**Perbandingan Serapan Tenaga Kerja PMDN dan PMA Non Migas dan Non Batubara  
Oktober - Desember Tahun 2022 dan Oktober - Desember Tahun 2023**



**Tabel 16****Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara Untuk Non Migas dan Non Batubara Oktober-Desember 2023**

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	Hongkong, RRT	17	91.462.100	1.353.639.080.000	29,17%
2	R.R. Tiongkok	7	69.749.300	1.032.289.640.000	22,25%
3	Singapura	132	53.005.300	784.478.440.000	16,91%
4	Inggris	14	47.955.000	709.734.000.000	15,30%
5	Malaysia	63	24.743.400	366.202.320.000	7,89%
6	Mauritius	1	9.771.400	144.616.720.000	3,12%
7	Kepulauan Virgin Inggris	19	7.601.700	112.505.160.000	2,42%
8	Seychelles	6	7.050.400	104.345.920.000	2,25%
9	India	3	578.900	8.567.720.000	0,18%
10	Swiss	10	522.100	7.727.080.000	0,17%
11	Australia	22	469.300	6.945.640.000	0,15%
12	Thailand	10	269.700	3.991.560.000	0,09%
13	Jepang	31	157.600	2.332.480.000	0,05%
14	Bermuda	5	116.600	1.725.680.000	0,04%
15	Belanda	1	37.200	550.560.000	0,01%
16	Kanada	11	30.600	452.880.000	0,01%
17	Perancis	2	2.800	41.440.000	0,00%
18	Uni Emirat Arab	3	2.800	41.440.000	0,00%
19	Amerika Serikat	2	-	-	0,00%
20	Denmark	1	-	-	0,00%
21	Gibraltar	6	-	-	0,00%
22	Korea Selatan	4	-	-	0,00%
23	Luxembourg	1	-	-	0,00%
24	Qatar	1	-	-	0,00%
25	Spanyol	1	-	-	0,00%
26	Swaziland	1	-	-	0,00%
27	Swedia	6	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>313.526.200</b>	<b>4.640.187.760.000</b>	<b>100%</b>

Tabel 17

## Realisasi Investasi PMA Non Migas dan Non Batubara di Kalimantan Timur Periode Oktober - Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Transportasi, Gudang & Telekomunikasi	37	1.715.505.000.000	14	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	57	911.434.320.000	1.103	4
3	Industri Mineral Non Logam	1	520.952.600.000	114	267
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	19	515.970.920.000	223	16
5	Industri Makanan	64	470.147.160.000	41	4
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	7	247.245.840.000	-	-
7	Kehutanan	7	109.377.920.000	134	-
8	Jasa Lainnya	36	78.580.600.000	46	2
9	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	5	46.634.800.000	6	-
10	Hotel & Restoran	43	12.306.200.000	139	-
11	Perdagangan & Reparasi	81	11.578.040.000	8	-
12	Konstruksi	5	405.520.000	3	-
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2	48.840.000	3	-
14	Industri Kayu	1	-	-	-
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	3	-	-	-
16	Industri Lainnya	1	-	-	-
17	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	8	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>380</b>	<b>4.640.187.760.000</b>	<b>1.834</b>	<b>293</b>

Tabel 18

## Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Oktober - Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	38	7.547.191.000.000	225	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	173	1.379.802.700.000	2.592	-
3	Industri Makanan	104	1.333.131.900.000	374	-
4	Transportasi, Gudang & Komunikasi	359	428.716.700.000	595	-
5	Listrik, Gas dan Air	62	383.212.900.000	9	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	76	336.656.300.000	37	-
7	Jasa Lainnya	455	269.031.600.000	508	-
8	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	25	173.571.400.000	118	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11	168.926.400.000	21	3
10	Hotel & Restoran	155	165.926.200.000	63	-
11	Perdagangan & Reparasi	727	146.120.200.000	181	-
12	Kehutanan	130	125.115.200.000	77	-
13	Industri Kayu	15	86.418.900.000	2	-
14	Konstruksi	455	62.850.500.000	160	-
15	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	23	30.386.600.000	20	-
16	Industri Mineral Non Logam	25	5.632.000.000	6	-
17	Industri Lainnya	38	1.714.100.000	42	-
18	Industri Karet & Plastik	7	-	-	-
19	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	5	-	2	-
20	Industri Tekstil	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.885</b>	<b>12.644.404.600.000</b>	<b>5.032</b>	<b>3</b>



Tabel 19

## Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Non Migas dan Non Batubara Periode Januari- Desember 2023

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	210	19.936.838.020.000	513	-
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	931	7.573.118.600.000	17.624	9
3	Industri Makanan	592	4.320.003.120.000	1.479	7
4	Transportasi, Gudang & Komunikasi	1.648	3.861.900.700.000	2.328	-
5	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	130	3.568.192.480.000	1.024	32
6	Industri Mineral Non Logam	86	2.342.898.580.000	564	369
7	Kehutanan	486	1.681.536.460.000	1.710	8
8	Jasa Lainnya	2.128	1.311.843.460.000	2.945	5
9	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	328	1.246.380.500.000	103	-
10	Perdagangan & Reparasi	4.958	1.164.677.040.000	3.050	3
11	Listrik, Gas dan Air	257	747.565.020.000	123	3
12	Industri Kayu	123	470.212.420.000	105	1
13	Konstruksi	2.706	462.959.020.000	1.413	3
14	Hotel & Restoran	808	461.553.320.000	1.243	-
15	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	111	330.156.840.000	191	-
16	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik & Jam	122	90.961.820.000	131	1
17	Industri Lainnya	165	19.152.840.000	118	-
18	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	32	4.198.760.000	11	-
19	Industri Tekstil	4	848.000.000	22	-
20	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	20	199.800.000	33	-
21	Perikanan	6	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>15.851</b>	<b>49.595.196.800.000</b>	<b>34.730</b>	<b>441</b>

Tabel 20

## Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara Untuk Non Migas dan Non Batubara Januari–Desember 2023

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
1	R.R. Tiongkok	43	324.533.200	4.803.091.360.000	34,50%
2	Singapura	584	170.356.600	2.521.277.680.000	18,11%
3	Malaysia	283	140.938.600	2.085.891.280.000	14,98%
4	Hongkong, RRT	73	96.991.700	1.435.477.160.000	10,31%
5	Inggris	54	93.155.500	1.378.701.400.000	9,90%
6	Kepulauan Virgin Inggris	67	44.162.800	653.609.440.000	4,69%
7	Thailand	46	10.449.800	154.657.040.000	1,11%
8	Mauritius	4	9.771.400	144.616.720.000	1,04%
9	Perancis	14	8.808.000	130.358.400.000	0,94%
10	Bermuda	6	7.843.900	116.089.720.000	0,83%
11	Jepang	139	7.563.000	111.932.400.000	0,80%
12	Seychelles	12	7.214.800	106.779.040.000	0,77%
13	Amerika Serikat	30	6.647.100	98.377.080.000	0,71%
14	Korea Selatan	25	6.057.000	89.643.600.000	0,64%
15	India	19	2.370.000	35.076.000.000	0,25%
16	Australia	115	1.102.700	16.319.960.000	0,12%
17	Swiss	23	711.600	10.531.680.000	0,08%
18	Kepulauan Cayman	16	643.900	9.529.720.000	0,07%
19	Swedia	29	595.200	8.808.960.000	0,06%
20	Belanda	20	542.400	8.027.520.000	0,06%
21	Spanyol	3	54.100	800.680.000	0,01%
22	Kanada	33	49.200	728.160.000	0,01%
23	Jerman	3	35.200	520.960.000	0,00%
24	Qatar	4	24.600	364.080.000	0,00%
25	Uni Emirat Arab	12	8.400	124.320.000	0,00%

No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
No	Asal Negara	Jumlah Proyek (Paket)	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)	Persentase (%)
26	Denmark	5	3.700	54.760.000	0,00%
27	Luxembourg	4	2.200	32.560.000	0,00%
28	Bangladesh	2	1.400	20.720.000	0,00%
29	Eswatini	2	-	-	0,00%
30	Gibraltar	24	-	-	0,00%
31	Rusia	2	-	-	0,00%
32	Swaziland	2	-	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.698</b>	<b>940.638.000</b>	<b>13.921.442.400.000</b>	<b>100%</b>



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023



No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3.968
U2	Prosedur	3.606
U3	Waktu Pelayanan	3.327
U4	Biaya/Tarif	3.484
U5	Produk Layanan	3.596
U6	Kompetensi Pelaksana	3.636
U7	Perilaku Pelaksana	3.650
U8	Saran dan Prasarana	3.557
U9	Penanganan Pengaduan	3.705

NILAI IKM	
<h1>89.37</h1>	
• KATEGORI	: SANGAT BAIK
• PERIODE SURVEI	: JANUARI-DESEMBER 2023
• RESPONDEN	: 496 ORANG

**TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA TELAH BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT BAGI KAMI UNTUK MEMPERBAIKI DAN  
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125  
Telp : (0541) 7807960,  Konsultasi Pengaduan : 085173066557, Konsultasi Perizinan : 085173466558, Konsultasi LKPM : 085173266556  
Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>, Pos-el: [dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id), [perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id)  
Media Sosial:  Dpmptsp Kalimantan Timur  @dpmptsp\_kaltim  dpmptsp.kaltim  DPMPTSP KALTIM

## BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBAHASAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA (RENSTRA 2019 – 2023)

Pada hari **Jumat** Tanggal **Lima Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur telah diselenggarakan rapat pembahasan Perbaikan/Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA 2019 – 2023) sebagai upaya tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 untuk Kegiatan Tahun 2022. Dalam pertemuan ini telah dibahas dan disepakati sebagai berikut:

1. Merevisi Sasaran yang termuat dalam BAB IV Dokumen Perubahan Renstra Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 yang semula 6 (enam) sasaran menjadi 2 (dua) sasaran
2. 6 (enam) sasaran sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah sebagai berikut :
  - Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi
  - Sasaran 2 : Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
  - Sasaran 3 : Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang lebih mudah dan cepat
  - Sasaran 4 : Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Sasaran 5 : Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik
  - Sasaran 6 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan.Direvisi menjadi 2 (dua) sasaran, yaitu :
  - Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara
  - Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik (IKM)



3. Faktor penyebab revisi sasaran ini antara lain:
- Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dalam hal ini dokumen Perubahan Renstra Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur, dan Casecading DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur;
  - Merupakan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan nilai dan predikat Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur
  - Sebagai upaya tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP

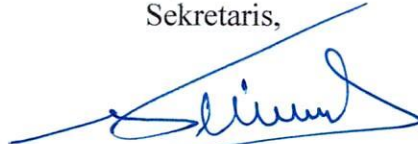
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



**Pugh Harjanto, S.STP., M.Si**  
NIP. 197908101998021001

Sekretaris,



**Noer Adenany, S.Sos, M.Si**  
NIP. 196706041988031007

Kabid Layanan Pengaduan, Advokasi  
dan Informasi Perizinan,



**Dra. Ottly Eka Permana L, SH, MAP**  
NIP. 196605081994032009

Kabid Perencanaan dan Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal,



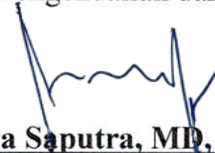
**Riawati, S.Si, MEM**  
NIP. 197108151996032002

Kabid Promosi Penanaman Modal,



**Arie Nur Nakahasima, SE, M.Si**  
NIP. 197109071990121001

Kabid Pengendalian dan Pelaksanaan,



**Surya Saputra, MD, S.Sos, M.Si**  
NIP. 196912251992031010

Plh. Kabid Layanan Perizinan dan  
NonPerizinan,



**Ani Ratna Sari, SP**  
NIP. 197407222007012012

Analisis Perencanaan Anggaran,



**Vilda Ayu Permata Sari, S.T.**  
NIP. 198908122014022008